



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
BAPPELITBANGDA

RPKD

KOTA KOTAMOBAGU

TAHUN 2024-2026

**RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Kotamobagu Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini mengacu pada Permendagri 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/Kota. RPKD Kota Kotamobagu merupakan bagian dari RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Kotamobagu 2024 -2026.

Oleh karena itu maka Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Kotamobagu bersama akademisi telah menyusun dokumen **RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KOTA KOTAMOBAGU** Tahun 2024 - 2026 yang memberikan berbagai informasi dan identifikasi tentang kemiskinan dan memuat berbagai strategi serta arah kebijakan pemerintah Kota Kotamobagu yang bersifat inklusif dalam penanggulangan kemiskinan terutama Kemiskinan Ekstrem dengan menetapkan Data Landas Penerima Manfaat Program Kemiskinan Nasional dan Daerah.

Akhirnya semoga dokumen ini dapat memberikan data dan informasi tentang kemiskinan di Kota Kotamobagu yang dibutuhkan oleh TKPKD Provinsi Sulawesi Utara maupun TNP2K Pusat dan untuk Perangkat Daerah atau *stakeholder* yang membutuhkan.

TKPKD KOTA KOTAMOBAGU

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1.Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum	5
1.3.Maksud dan Tujuan	6
1.4.Sistematika Penulisan	7
BAB II METODOLOGI & INDIKATOR	9
2.1. Metodologi	9
2.2. Indikator	11
BAB III KONDISI UMUM DAERAH	15
3.1. Kondisi Geografis	15
3.2. Kondisi Demografi	23
3.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	25
3.4. Aspek daya Saing Daerah	33
BAB IV PROFIL KEMISKINAN DAERAH	40
4.1. Kondisi Kemiskinan	40
4.2. Kondisi Kemiskinan Ekstrem	48

BAB V	ANALISIS DATA LANDAS TERINTEGRASI DAERAH	50
BAB VI	STRATEGI DAN PROGRAM PRIORITAS	55
	6.1. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	55
	6.2. Program Penanggulangan Kemiskinan	61
	3.3. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	42
BAB VII	LOKUS PRIORITAS	69
BAB VIII	KAIDAH PELAKSANAAN, MONITORING & EVALUASI	75
BAB IX	PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
3.1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Kotamobagu	16
3.2	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Kotamobagu Tahun 2021 - 2022	24
3.3	IPM Kota Kotamobagu Tahun 2016 - 2021	25
3.4	Perbandingan IPM di Sulawesi Utara Tahun 2018 - 2022	26
3.5	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita per Bulan	28
3.6.	PDRB per Kapita Kota Kotamobagu Tahun 2018 - 2022	33
3.7.	Migrasi Risen Antar Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022	37
4.1.	Perkembangan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kota Kotamobagu Tahun 2011 - 2022	42
4.2.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Kotamobagu Tahun 2012 - 2022	44
4.3.	Jumlah Desil 1 P3KE Kota Kotamobagu	48
5.1.	Data Landas Penerima Manfaat Program Kemiskinan	
5.2.	Data Landas Penerima Manfaat Program Kemiskinan di Kecamatan Kotamobagi Barat	53
5.3.	Data Landas Penerima Manfaat Program Kemiskinan di Kecamatan Kotamobagi Selatan	53
5.4.	Data Landas Penerima Manfaat Program Kemiskinan di Kecamatan Kotamobagi Timur	54
5.5.	Data Landas Penerima Manfaat Program Kemiskinan di Kecamatan Kotamobagi Utara	54
6.1.	Program Kemiskinsn Menurut Urusan Pemerintahan dan Bidang di Kota Kotamobagu	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
1.1.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	3
3.1.	Peta Kota Kotamobagu	15
3.2.	Piramida Penduduk Kota Kotamobagu Tahun 2022	24
3.3.	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kota Kotamobagu Tahun 2017 - 2021	27
3.4.	Distribusi Persentase PDRB Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022	29
3.5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu tahun 2018 - 2022	30
3.6.	Perbandingan Gini Ratio Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2019 - 2021	32
3.7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Kotamobagu Tahun 2017 - 2022	34
3.8.	TPT Kota Kotamobagu Tahun 2017 - 2022	35
3.9.	Migrasi Risen Antar Provinsi Menurut Kabupaten Kota Tahun 2022	36
3.10.	Persentase Penduduk Migran yang Melakukan Commuter Berdasarkan Lokasi Tempat Bekerja Migrasi Tahun 2022	38
3.11.	Persentase Migran Risen Berdasarkan Motif Melakukan Migrasi di Provinsi Sulawesi Utara	39
4.1.	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Nasional. Provinsi dan Kota Kotamobagu Tahun 2015 - 2022	24
4.2.	Analisis Relevansi Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin & Miskin Ekstrem	46
4.3	Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan,dan Indeks Keparahan Kemiskinan	46
4.4	Analisis Relevansi Tingkat Kesejahteraan Desil 1 Kota Kotamobagu	47
5.1.	Target Penerima Manfaat Program Kemiskinan	50

5.2.	Target Pemurnian Data	51
5.3.	Identifikasi Data P3KE Desil 1	52
6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Kesejahteraan	58
6.2	Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Pendidikan	58
6.3.	Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Kesehatan	59
6.4.	Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Ketenaga kerjaan	59
6.5.	Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Kependudukan	60
7.1.	Prioritas Wilayah Menurut Indeks Pelayanan Dasar	69
7.2.	Prioritas Wilayah Menurut Indeks Pelayanan Dasar Kota Kotamobagu	70
7.3.	Prioritas Wilayah Menurut Indeks Kesulitan Geografis	70
7.4.	Prioritas Wilayah Menurut Indeks Kesulitan Geografis Kota Kotamobagu	71
7.5.	Prioritas Wilayah Menurut Indeks Dimensi Aksesibilitas	71
7.6.	Prioritas Wilayah Menurut Indeks Dimensi Aksesbititas Kota Kotamobagu	72
7.7.	Prioritas Wilayah Menurut Indeks Dimensi Infrastruktur	72
7.8.	Prioritas Wilayah Menurut Indeks Dimensi Infrastruktur Kota Kotamobagu	73
7.9.	Lokus Prioritas Penanganan Kemiskinan Kota Kotamobagu	74



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Kotamobagu Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini mengacu pada Permendagri 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/Kota. RPKD Kota Kotamobagu merupakan bagian dari RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Kotamobagu 2024 -2026.

Oleh karena itu maka Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Kotamobagu bersama akademisi telah menyusun dokumen **RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KOTA KOTAMOBAGU** Tahun 2024 - 2026 yang memberikan berbagai informasi dan identifikasi tentang kemiskinan dan memuat berbagai strategi serta arah kebijakan pemerintah Kota Kotamobagu yang bersifat inklusif dalam penanggulangan kemiskinan terutama Kemiskinan Ekstrem dengan menetapkan Data Landas Penerima Manfaat Program Kemiskinan Nasional dan Daerah.

Akhirnya semoga dokumen ini dapat memberikan data dan informasi tentang kemiskinan di Kota Kotamobagu yang dibutuhkan oleh TKPKD Provinsi Sulawesi Utara maupun TNP2K Pusat dan untuk Perangkat Daerah atau *stakeholder* yang membutuhkan.

TKPKD KOTA KOTAMOBAGU



1.1 LATAR BELAKANG

Isu dan masalah kemiskinan menjadi topik utama yang harus diselesaikan oleh setiap pemerintah pusat dan daerah karena merupakan masalah makro ekonomi yang menunjukkan target pembangunan sudah bersifat inklusif atau tidak. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dari pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin termasuk kemiskinan ekstrem dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Tren penurunan penduduk miskin di Indonesia pada Maret tahun 2023 sebesar 0,46 juta orang atau jumlah penduduk miskin sebesar 25,90 juta orang. Menurut BPS angka kemiskinan ekstrem per September 2023 adalah 1,74 %. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) menjadi arahan dalam RPJMN 2020-2024 dengan visi *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong”* menetapkan peningkatan kualitas manusia Indonesia pada misi pertama. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi



ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 yang harus terinternalisasi kedalam dokumen perencanaan daerah RPJPD Provinsi dan Kabupaten Kota dan dokumen perencanaan strategis daerah termasuk dokumen RPKD Provinsi dan Kabupaten Kota. Visi Indonesia Emas 2045 **“Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**. Isu Kemiskinan tetap menjadi agenda utama pembangunan nasional dalam 20 upaya Transformatif Super Prioritas yaitu melakukan Transformasi Sosial penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

Kompleksnya masalah kemiskinan, secara konseptual tidak sekedar terkait kemampuan ekonomi masyarakat, tetapi menyangkut status kehidupan sosial masyarakat. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan upaya terpadu dan sinergi ditingkat pusat dan daerah. Untuk mendorong keterpaduan dan alokasi anggaran lintas pemerintahan dalam pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dengan menetapkan beberapa wilayah prioritas yaitu tahun 2021 sebanyak 35 kabupaten di 7 provinsi; tahun 2022 sebanyak 212 kabupaten/kota di 25 provinsi dan tahun 2023-2024 dilakukan perluasan secara bertahap hingga mencapai 514 kabupaten di 34 provinsi.

Implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan telah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan, yang memiliki tujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Usaha percepatan tersebut dituangkan dalam 4 (empat) strategi yakni; 1) Penyempurnaan Program Perlindungan Sosial; 2) Peningkatan Akses Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Dasar; 3) Pemberdayaan Masyarakat; dan 4) Pembangunan Inklusif.

Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti pada gambar memiliki 17 poin tujuan, dan untuk isu kemiskinan menjadi tujuan pertama. “Tanpa Kemiskinan” memiliki 7 (tujuh) target dan 12 (dua belas) indikator dan melibatkan seluruh perangkat daerah.

Gambar 1.1
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)



Target kemiskinan dalam TPB/SDGS adalah sebagai berikut : 1) Mengurangi kemiskinan di semua dimensi; 2) Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial; 3) Menjamin hak yang sama; 4) Membangun ketahanan masyarakat miskin; dan 5) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan terjangkau. Metadata



indikator terdiri atas tingkat kemiskinan ekstrem, persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar dan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana.

Program penanggulangan kemiskinan dibagi ke dalam 3 (tiga) klaster, yaitu; 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan Sosial; 2) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, serta 3) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usah Kecil. Program-program ini dilaksanakan oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran COVID- 19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, serta daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Dari sisi ekonomi, COVID-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan.

Hal ini membuat masalah kemiskinan masih menjadi target kinerja pembangunan di Kota Kotamobagu, dengan upaya daerah ikut memprioritaskan penduduk miskin ekstrem dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan di beberapa perangkat daerah. Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang berisi capaian indikator kemiskinan yang diperoleh melalui penilaian terhadap capaian kinerja kegiatan dan program yang sudah dilaksanakan di daerah,



baik program nasional maupun program daerah sendiri. Selanjutnya, dapat dilihat indikator yang mencapai target serta indikator yang belum mencapai target. Serta berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan menopang pencapaian visi dan misi Kota Kotamobagu.

RPKD juga di dalamnya berisikan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan. Evaluasi anggaran dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat relevansi dan efektivitas serapan anggaran terhadap program dan kegiatan dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Melalui dokumen perencanaan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan pada pelaksanaan program dan kegiatan untuk jangka menengah.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Kotamobagu ini berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022, Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022, Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penyusunan

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Kotamobagu ini disusun untuk menyampaikan perkembangan percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem di Kota Kotamobagu sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.



1.3.2 Tujuan Penyusunan

Disusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Kotamobagu ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Kotamobagu serta mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi antar kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan serta pengurangan pengangguran yang berasal dari kementerian atau Lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan *stakeholder* lainnya yang memiliki komitmen mensejahterakan masyarakat sebagai penerima manfaat yang efektif, efisien, dan terarah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Kotamobagu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, yakni:

1. Bab I Pendahuluan

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, dasar hukum yang digunakan, maksud dan tujuan, serta sistematika dalam penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Kotamobagu.

2. Bab II Metodologi dan Indikator

Bab ini berisi metodologi analisis kemiskinan daerah dalam perencanaan jangka menengah percepatan penanggulangan kemiskinan.



3. Bab III Kondisi Umum Daerah

Bab ini berisi uraian mengenai kondisi Kota Kotamobagu dalam berbagai aspek penopang percepatan penanggulangan kemiskinan.

4. Bab IV Profil Kemiskinan Daerah

Pada bagian ini diuraikan kondisi kemiskinan daerah Kota Kotamobagu dari berbagai dimensi.

5. Bab V Analisis Data Landas Terintegrasi Daerah

Bab ini berisi tentang hasil pemurnian data yang digunakan sebagai data landas penerima manfaat program kemiskinan dan miskin ekstrem daerah.

6. Bab VI Strategi dan Program Prioritas

Bab ini berisi tentang program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam berbagai bidang untuk menopang percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Kotamobagu.

7. Bab VII Lokus Prioritas

Pada bagian ini diuraikan secara detail terget wilayah yang menerima manfaat program untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan daerah.

8. Bab VIII Kaidah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan untuk monitoring serta evaluasi pelaksanaan program prioritas penanggulangan kemiskinan dan miskin ekstrem daerah.

9. Bab IX Penutup

Berisi tentang rencana tindak lanjut pemerintah daerah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kota Kotamobagu.



BAB II METODOLOGI & INDIKATOR

2.1. METODOLOGI

Proses mendapatkan data dasar penduduk miskin di Kota Kotamobagu diawali dengan pertemuan beberapa OPD teknis yang terkait di tingkat kota, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Bappelitbang. Pertemuan tersebut membicarakan tentang data kemiskinan yang berbeda-beda yang digunakan oleh masing-masing OPD teknis tersebut. Sehingga Bappelitbang Kota Kotamobagu berpendapat bahwa penyatuan definisi penduduk miskin perlu dilakukan. Setelah melalui diskusi yang intens dan kondusif, masing-masing OPD teknis bersepakat bahwa data yang diverifikasi ke masing-masing kecamatan akan menggunakan data yang dikumpulkan oleh Dinas Sosial yang terakhir digunakan untuk membagikan dana bantuan dari Pemerintah di masa penanggulangan COVID-19.

Proses verifikasi oleh Tim Bappelitbang dimulai dengan menggunakan data awal dari Dinas Sosial, kemudian diuji petik di lapangan. Setelah dilakukan verifikasi, data tersebut bandingkan dengan data dikeluarkan oleh BKKBN. Perbedaan data dari BKKBN dan data Dinas Sosial terletak pada cakupannya. Data BKKBN hanya berkaitan dengan pasangan usia subur saja, sedangkan data Dinas



Sosial mencakup semua penduduk. Jadi kedua data tersebut berbeda jumlahnya. Dinas Sosial lebih besar datanya, sedang BKKBN lebih kecil jumlahnya.

Data hasil verifikasi tersebut akan ditelaah silang dengan NIK dan alamat berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan, data dari BPS dijadikan sebagai rujukan pembanding atau plafon persentase dan jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga data yang telah diverifikasi dengan data BKKBN, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan BPS inilah yang akan dinilai sebagai data valid yang menggambarkan profil kemiskinan kabupaten yang kurang lebih mendekati realita sosial demografis daerah. Data inilah yang akan digunakan Provinsi, termasuk di dalamnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Kotamobagu dalam menanggulangi kemiskinan di daerah ini.

Selanjutnya Bapelitbang menggunakan data P3KE sebagai data untuk pensasaran kemiskinan ekstrem sesuai dengan target pemerintah nasional adalah 0 (nol) di tahun 2024. Data P3KE dimurnikan daerah sesuai dengan target program prioritas daerah.

Berdasarkan data BPS angka kemiskinan ekstrem berjumlah 980 kepala keluarga (KK) dan setelah diverifikasi kembali sisa 25 KK. Adapun pendataan miskin ekstrem melibatkan perangkat desa dan untuk proses verifikasi harus disepakati oleh masing-masing desa/ kelurahan dan disertai berita acara dimana ketua BPD dan ketua LPM ikut terlibat.

Hasil verifikasi membagi kategori miskin atas 2 (dua) bagian yaitu pertama miskin ekstrem yang bantuannya bertujuan meningkatkan status ekonomi dan



kedua adalah miskin mutlak dimana kategori ini berhak mendapat bantuan sepanjang hidup.

2.2. INDIKATOR DATA MASYARAKAT MISKIN

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Konsep Garis Kemiskinan :

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan



dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Pengukuran kemiskinan menurut BPS terdiri dari :

- Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$$\alpha = 0$$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk.

- Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index - P1) merupakan ukuran rata - rata kesenjangan pengeluaran masing - masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata - rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Rumus Perhitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$$\alpha = 1$$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$



q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk.

- Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Rumus

Perhitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Indikator penduduk miskin adalah berdasarkan data BPS adalah mereka yang berada di bawah Garis Kemiskinan, serta beberapa indikator sosial ekonomi lainnya seperti :

- Tidak ada anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan;
- Informasi tentang Keadaan Kesehatan dari penduduk yang dikeluarkan oleh Puskesmas/atau keterangan dari kepala desa setempat;
- Jenis Pendidikan yang dapat ditempu oleh penduduk tersebut; atau
- Ada anak 7-15 tahun tidak sekolah



- Jenis pekerjaan yang dilakukan;
- Keadaan sosial masyarakat/penduduk setempat;
- Akses terhadap jaringan air bersih;
- Akses terhadap jaringan sanitasi;
- Jenis /keadaan rumah yang ditempati: milik sendiri, menempati rumah orang lain, tinggal dengan /numpang dengan orang lain; tidak memiliki tempat tinggal;
- Jenis lantai tanah;
- Tidak setiap anggota keluarga makan makanan beragam paling sedikit 2 (dua) kali sehari.

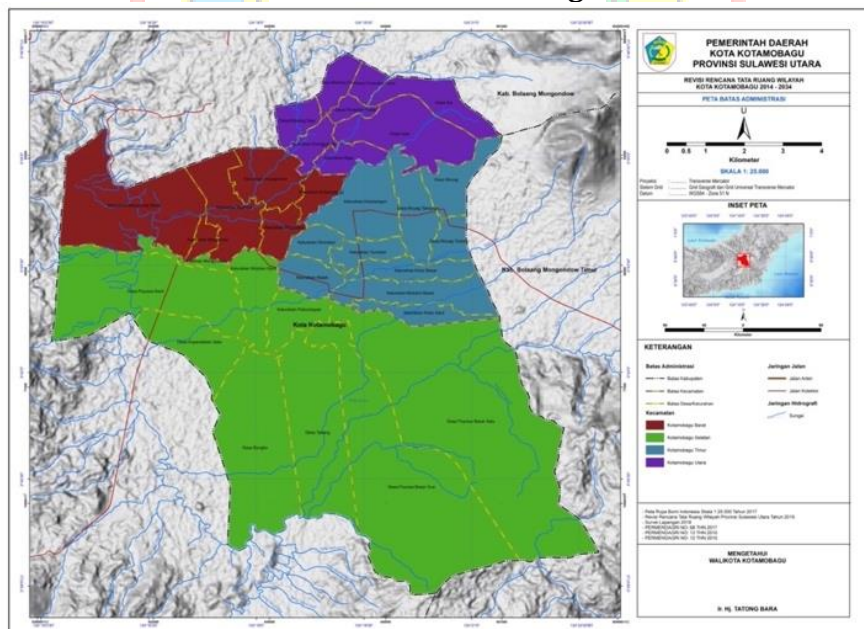




3.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kota Kotamobagu terletak pada jarak ± 180 km di selatan ibu kota Provinsi (kota manado) berada pada posisi geografis antara $0^{\circ} 41' 16,29''$ dan $0^{\circ} 46' 14,88''$ Lintang Utara, serta antara $124^{\circ} 15' 9,56''$ dan $124^{\circ} 21' 1,93''$ Bujur Timur dengan keseluruhan luas wilayah $108,89$ km².

Gambar 3.1
Peta Kota Kotamobagu



Kota Kotamobagu berbatasan langsung dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), serta berdekatan



dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Jarak antara Kotamobagu dengan Manado 183,72 Km (melalui Inobonto) dan 207,26 Km (melalui Modinding). Kota Kotamobagu merupakan pusat kegiatan ekonomi terkemuka di bagian barat dan selatan Sulawesi Utara.

Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu secara Administrasi terbagi kedalam 4 kecamatan dan 33 desa/kelurahan. Kecamatan Kotamobagu Selatan memiliki luas 62,97 km²; Kecamatan Kotamobagu Timur dengan luas 23,69 km²; Kecamatan Kotamobagu Barat dengan luas 12,20 km²; Kecamatan Kotamobagu Utara dengan luas 10,04 km².

Tabel 3.1.

Luas Wilayah dan Kecamatan Kota Kotamobagu

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)
(1)	(2)	(3)
Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar	62,97
Kotamobagu Timur	Kotobangon	23,69
Kotamobagu Barat	Mongkonai Barat	12,20
Kotamobagu Utara	Bilalang I	10,04
Kota Kotamobagu		108,89

Kota Kotamobagu dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten hasil pemekaran yaitu; Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (induk), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Awalnya Kota Kotamobagu sebelum dimekarkan sudah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Induk. Dalam konteks regional, Kota Kotamobagu merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh



produk jasa khususnya diwilayah Bolaang Mongondow Raya dan umumnya pada kawasan propinsi Sulawesi Utara.

Secara geografis, Kota Kotamobagu merupakan bagian perwilayahan kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, hal ini karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis Kota Kotamobagu berfungsi:

- a. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;
- b. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam wilayah Kota Kotamobagu yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan;
- c. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW Kota Kotamobagu; dan
- d. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah Kota Kotamobagu.

Kawasan strategis Kota Kotamobagu ditetapkan berdasarkan:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota Kotamobagu;
- b. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;



- c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
- d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kota Kotamobagu; dan
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

Di dalam wilayah Kota Kotamobagu itu sendiri selain terdapat kawasan strategis Kota Kotamobagu juga terdapat Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Utara. Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar atau daerah dibelakangnya (hinterland), melalui pembudayaan sektor atau subsektor basis sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antar daerah. Tujuan utama dari kawasan andalan adalah mempercepat pembangunan.

Kota Kotamobagu yang berdasarkan letaknya memiliki lokasi yang strategis. Kota Kotamobagu terletak pada simpul jalur perdagangan, jasa dan transportasi regional Bolaang Mongondow Raya, dimana daerah Kawasan Bolaang Mongondow Raya tersebut sedang berkembang, terutama Kota Kotamobagu yang menjadi kawasan andalan bagi daerah sekitarnya.

Kota Kotamobagu akan berperan sebagai kota transit bagi para pelaku perjalanan antara Kotabunan, Molibagu, Lolak dan Boroko. Dengan demikian akan mendorong perkembangan sektor perdagangan dan jasa terutama dalam distribusi produk dan potensi lokal.



Kota Kotamobagu berperan sebagai terminal (pusat) perdagangan hasil pertanian bagi daerah sekitarnya, penyedia alat-alat dan input bagi kegiatan pertanian, serta sebagai pusat industri pengolahan pertanian. Peran ini didukung oleh keberadaan wilayah sekitar yang sangat potensial bagi pengembangan pertanian, baik tanaman pangan, buah, sayuran, dan hasil kebun lainnya. Keberhasilan peran ini akan membentuk suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Kota Kotamobagu dan Kabupaten di Kawasan Bolaang Mongondow Raya.

Kota Kotamobagu telah ditetapkan sebagai calon ibu Kota Provinsi Bolaang Mongondow Raya dengan melalui analisa dan kajian indikator penilaian calon ibukota suatu Provinsi dan sesuai ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aktifitas ekonomi, maka Kota Kotamobagu dinilai memenuhi persyaratan sebagai calon ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya. Selain itu pula dari sisi kajian administrasi, Kota Kotamobagu sebagai calon ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya, telah mendapat Surat Keputusan dari Bupati dan DPRD se Bolaang Mongondow Raya tentang persetujuan penetapan Kota Kotamobagu sebagai Ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya.

Sebagai calon Ibu Kota Provinsi Bolaang Mongondow Raya maka di pandang perlu adanya pengembangan wilayah Kota Kotamobagu, meliputi PASSI dan LOLAYAN, merupakan wilayah yang ideal sebagai calon Ibu Kota Provinsi Bolaang Mongondow Raya, guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat serta memperkuat basis ekonomi rakyat. Secara historis, kultur dan budaya, Kerajaan Bolaang Mongondow mempunyai 4 (empat) wilayah adat masing-masing: Passi, Lolayan, Kotabunan dan Bolaang.



Passi dan Lolayan merupakan satu wilayah mongondow, yang disatukan dengan bahasa mongondow, serta secara historis, kultur dan budaya menyatu dengan masyarakat Kota Kotamobagu.

Salah satu tujuan pemekaran wilayah yaitu pendekatan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Passi dan Lolayan, ditinjau dari geoposisi strategis menyatu dengan wilayah Kota Kotamobagu.

Kota Kotamobagu merupakan pusat rujukan kehidupan sosial budaya di Bolaang Mongondow pada umumnya. Kebudayaan Bolmong merupakan entitas yang diakui dan dipraktikkan sejak bangsa-bangsa barat belum tiba di Nusantara. Kekayaan budaya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem nilai budaya, etos, orientasi hidup, hingga pada hal-hal praktis dan kasat mata seperti bentuk pakaian, topi, keris, dan asesoris dalam rumah tangga. Semua kekayaan itu kini tinggal dapat dilihat dalam upacara perkawinan, tarian, atau upacara adat tertentu.

Pesan dan warisan leluhur tentang kepemimpinan dalam masyarakat Mongondow bersumber dari “*dodandian Paloko dan Kinalang*” serta kehidupan *pogogutat* (persaudaraan) didsarkan pada sembuyan *Mototompiaan, Mototabian, Mototanoban, bo Mooaheran* yang tetap terawat dan menjadi etik sosial budaya di Bolmong pada umumnya, termasuk Kotamobagu. Nilai sosial budaya ini merupakan modal sosial (*social capital*) yang sangat berharga bagi pembangunan Kota Kotamobagu yang berjati diri dan punya karakter

Status daya dukung daya tampung lingkungan hidup Kota Kotamobagu menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan jasa ekosistem didalamnya dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan



dan air. Informasi status daya dukung daya tampung lingkungan hidup dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji perencanaan dan pengendalian pembangunan suatu wilayah agar tidak berdampak terhadap kelestarian lingkungan.

Hasil kajian terhadap status daya dukung daya tampung lingkungan hidup di Kota Kotamobagu untuk pangan dan air menggunakan pendekatan sistem grid, dengan mempertemukan ketersediaan (*supply*) dan Kebutuhan (*demand*).

Akan tetapi nilai tersebut sangat perlu diperhatikan mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang, fluktuatif kondisi ketersediaan pangan dan air serta derasnya alih fungsi lahan yang terjadi sehingga kedepannya jika tanpa pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup maka ketersediaan yang ada saat ini akan semakin defisit.

Secara umum status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kota Kotamobagu sudah melampaui lebih dari setengah luas Kota Kotamobagu yakni 7.397 Ha. Begitu juga dengan status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kota Kotamobagu sudah melampaui lebih dari setengah luas Kota Kotamobagu yakni 7.397 Ha. Namun tetap diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang agar supaya lingkungan tetap terus terjaga.

Kemampuan lahan untuk jasa lingkungan pengatur air, pengatur kualitas udara, pengatur kualitas iklim, dan pengatur mitigasi longsor proporsinya terbesar ada pada status sedang. Kemampuan lahan untuk jasa lingkungan penyedia air, penyedia serat, pengatur mitigasi banjir, pengatur mitigasi karhutla, pemurnian air, penyerbukan alam, pengendalian hama,



keanekaragaman hayati dan pembentukan tanah proporsinya terbesar ada pada status rendah.

3.2. KONDISI DEMOGRAFI

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, penduduk merupakan modal dasar yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan masa depan suatu daerah.

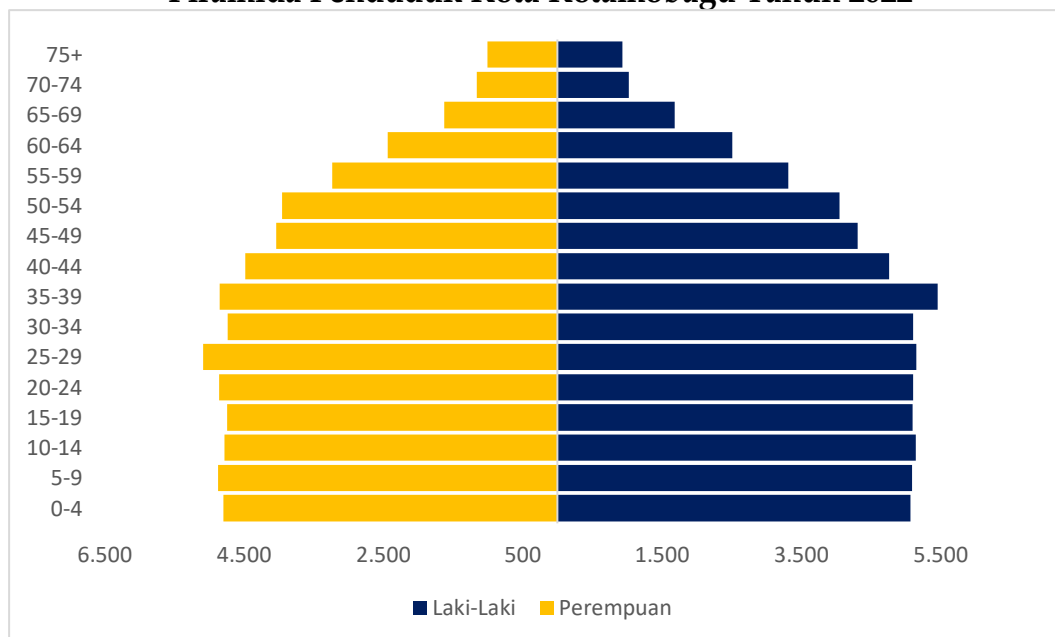
Penduduk Kota Kotamobagu berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 berdasarkan sensus penduduk 2020 adalah sebanyak 124.473 jiwa. Pada tahun 2022 turun menjadi 123.146 jiwa, atau dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar - 0,46%. Selanjutnya dalam Tabel 3.2. akan ditampilkan jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk Kota Kotamobagu tahun 2021 – 2022

Tabel 3.2.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Kotamobagu
Tahun 2021-2022

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2022 (%) Annual Population Growth Rate 2020–2022 (%)
(1)	(2)	(3)
Kotamobagu Selatan	33 088	-0,79
Kotamobagu Timur	30 603	-0,97
Kotamobagu Barat	41 851	0,02
Kotamobagu Utara	17 604	-0,10
Kotamobagu	123 146	-0,46

Menurut kecamatan menunjukkan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kotamobagu Barat mencapai 33,98%, memiliki laju pertumbuhan penduduk yang positif sebesar 0,02% serta memiliki kepadatan penduduk per km² terbesar mencapai 2.643,78 km².

Gambar 3.2
Piramida Penduduk Kota Kotamobagu Tahun 2022





Komposisi penduduk Kota Kotamobagu berdasarkan usia sekolah pada tahun 2021 yaitu usia 7-12 tahun sebanyak 12.288 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 6.817 jiwa, usia 16-18 tahun sebanyak 7.024 jiwa dan usia 19-24 tahun sebanyak 12.667 jiwa

3.3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dalam mengukur capaian kesejahteraan penduduk secara umum, alat ukur yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berbasis komponen dasar kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, antara lain: 1) mencakup umur Panjang dan sehat; 2) pengetahuan, dan 3) kehidupan yang layak. Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Untuk dimensi pengetahuan, indikator yang digunakan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Tabel 3.3.
IPM Kota Kotamobagu Tahun 2016 – 2021

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Harapan Hidup	69,69	69,72	69,97	70,33	70,47	70,6
2	Rata-rata lama sekolah	9,97	9,98	10,04	10,09	10,1	10,31
3	Harapan lama sekolah	12,67	12,68	12,75	12,78	12,79	12,88
4	Pengeluaran per kapita	10.088	10.366	10.663	11.098	10.744	10.848
	IPM	71,68	72	72,55	73,22	72,93	73,47

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator yang digunakan yaitu kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan



pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Data terakhir tahun 2016 IPM Kota Kotamobagu sebesar 71,68, meningkat menjadi 72 pada tahun 2017, 72,55 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 sebesar 73,22 menurun pada tahun berikutnya menjadi 72,93 pada tahun 2020 dan capaian pada tahun 2021 meningkat menjadi 73,47. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup penduduk Kota Kotamobagu dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengeluaran belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Tabel 3.4.
Perbandingan IPM di Sulawesi Utara Tahun 2018 - 2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
Bolaang Mongondow	66,91	67,82	67,89	68,16	68,95
Minahasa	74,97	75,47	75,29	75,73	76,18
Kepulauan Sangihe	69,67	70,53	70,73	71,07	71,63
Kepulauan Talaud	68,32	68,97	69,40	69,83	70,43
Minahasa Selatan	70,86	71,68	72,11	72,32	72,89
Minahasa Utara	73,05	73,95	73,90	74,11	74,69
Bolaang Mongondow Utara	66,32	66,91	66,99	67,39	68,06
Siau Tagulandang Biaro	66,75	67,48	67,64	68,05	68,94
Minahasa Tenggara	69,66	70,47	70,51	71,06	71,48
Bolaang Mongondow Selatan	64,49	65,28	65,00	65,42	65,9
Bolaang Mongondow Timur	65,21	68,08	65,99	66,55	67,21
Kota/Municipality					
Manado	78,41	79,12	78,93	79,2	79,66
Bitung	73,27	74,20	74,10	74,2	74,7
Tomohon	75,78	76,67	76,69	76,86	77,44
Kotamobagu	72,55	73,22	72,97	73,47	73,96
Sulawesi Utara	72,20	72,99	72,93	73,3	73,81

Kenaikan IPM ini seharusnya menjadi pemacu peran nyata dari segenap komponen masyarakat Kota Kotamobagu agar diperoleh hasil yang lebih optimal. Akan tetapi perlu disadari bahwa hasil ini merupakan investasi pembangunan jangka panjang yang tidak berdampak instan pada investasi langsung. IPM yang dijadikan sebagai indikator makro pembangunan selain memiliki makna yang positif untuk mengukur seberapa besar kinerja pembangunan daerah, juga memiliki makna penting untuk melihat disparitas wilayah.

Gambar 3.3
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kota Kotamobagu Tahun 2016-2021



Pengeluaran per kapita yang terus meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa semakin membaiknya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kecuali tahun 2020 menurun menjadi Rp10.744.000 karena mewabahnya pandemi Covid-19, yang menghambat kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Kotamobagu dapat dilihat pada perkembangan pengeluaran per kapita Kota Kotamobagu dapat dilihat pada gambar 3.3.



Data menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita keluarga per bulan yang berada di bawah 199.999 rupiah tidak ada, hanya dikelompok berikutnya di bawah 299.999 rupiah terdapat 3,55%. Jika Garis Kemiskinan Kota Kotamobagu tahun 2022 sebesar 353.872 rupiah per kapita per bulan, maka mereka yang berada di kelompok ini masuk pada kelompok penduduk miskin. Sedangkan pada kelompok berikutnya sampai pada 499.999 rupiah sebanyak 6,14%, sebagian merupakan penduduk miskin. Paling banyak pengeluaran penduduk perkapita sudah berada diatas 1.5 juta rupiah sebanyak 37,21 %.

Tabel 3.5.
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita per Bulan

Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan (rupiah) <i>Class of Monthly Expenditure per Capita (rupiahs)</i>	Persentase Penduduk <i>Percentage of Population</i>		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
< 150 000	0,00	0.00%	
150 000–199 999	0,00	0.00%	
200 000–299 999	0,33	3.55%	
300 000–499 999	11,30	6.14%	
500 000–749 999	15,45	17.71%	
750 000–999 999	17,18	14.97%	
1 000 000–1 499 999	22,52	20.42%	
> 1 500 000	33,22	37.21%	
Jumlah/Total	100,00	100.00%	

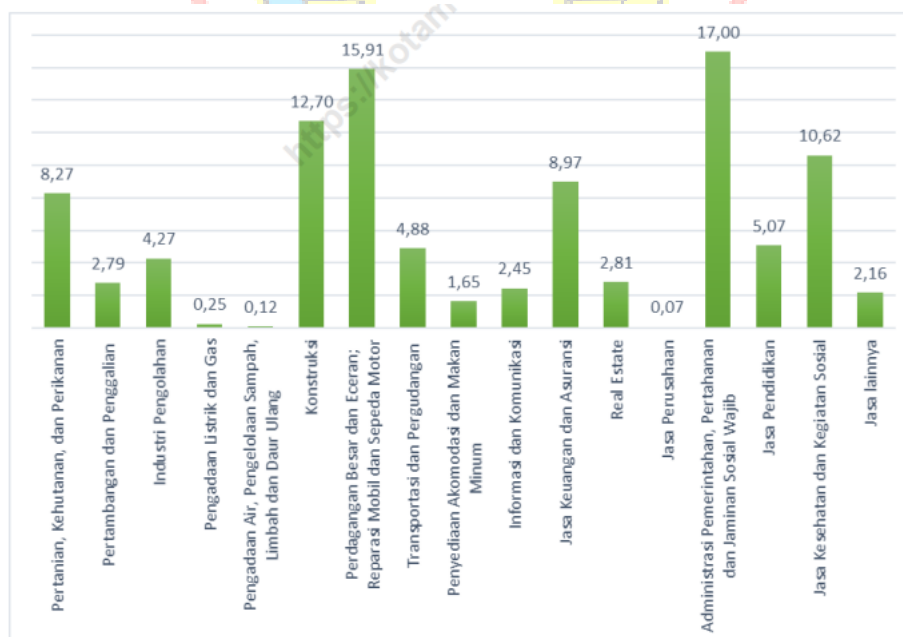
Selanjutnya, untuk melihat tingkat kesejahteraan dari segi ekonomi, indikator yang digunakan adalah PDRB dan PDRB Per Kapita. PDRB merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan



perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, pada umumnya dalam waktu satu tahun, sedangkan PDRB Per Kapita dapat diartikan sebagai hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun.

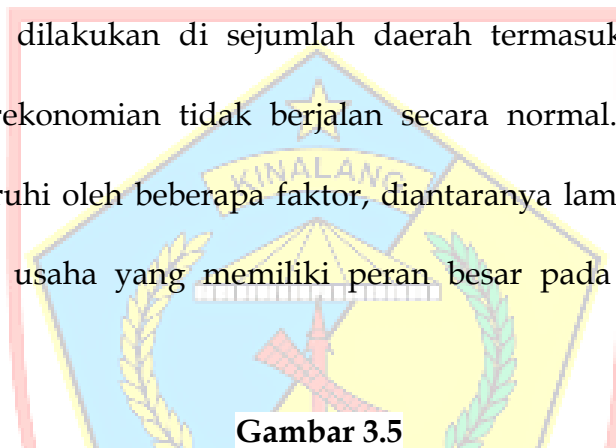
Gambar 3.4

Distribusi Persentase PDRB Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022



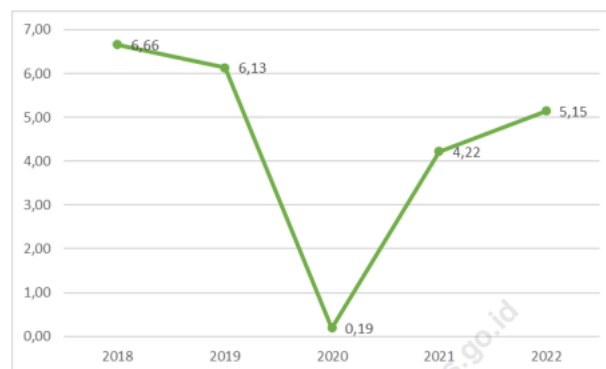
PDRB Kota Kotamobagu pada tahun 2022 terbesar kontribusinya adalah lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial yang paling besar (17,00%) diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,91% dan konstruksi (12,70%).

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu tahun 2020 mengalami kontraksi alias tumbuh negatif sebesar -0,41%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kota Kotamobagu, membuat roda perekonomian tidak berjalan secara normal. Pertumbuhan yang lambat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya lambatnya pertumbuhan beberapa lapangan usaha yang memiliki peran besar pada perekonomian Kota Kotamobagu.



Gambar 3.5

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu Tahun 2018 - 2022



Pada tahun 2021, beberapa lapangan usaha telah menunjukkan pertumbuhan positif jika dibandingkan tahun 2020, diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan jasa lainnya. Tetapi masih ada beberapa lapangan usaha yang tumbuh lambat dan menunjukkan pertumbuhan



negatif diantaranya Pertambangan dan Penggalian, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan real estate.

Pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,15 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,22 persen. Kegiatan perekonomian Kota Kotamobagu pada tahun 2022 sudah membaik pasca pandemi COVID-19 dikarenakan sudah tidak ada pembatasan sosial, sehingga berbagai kegiatan mulai diadakan, seperti Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara XI 2022, Roadshow Drag Race, HUT Kota Kotamobagu, Lomba Balap Motor, dan berbagai kegiatan keagamaan dilaksanakan secara meriah. Hal ini menyebabkan, sebagian besar lapangan usaha di Kota Kotamobagu mengalami pertumbuhan. Beberapa Lapangan Usaha yang mencetak pertumbuhan tertinggi diantaranya Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Jasa Lainnya, serta Transportasi dan Pergudangan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 10,89 persen; 9,79 persen; dan 9,53 persen.

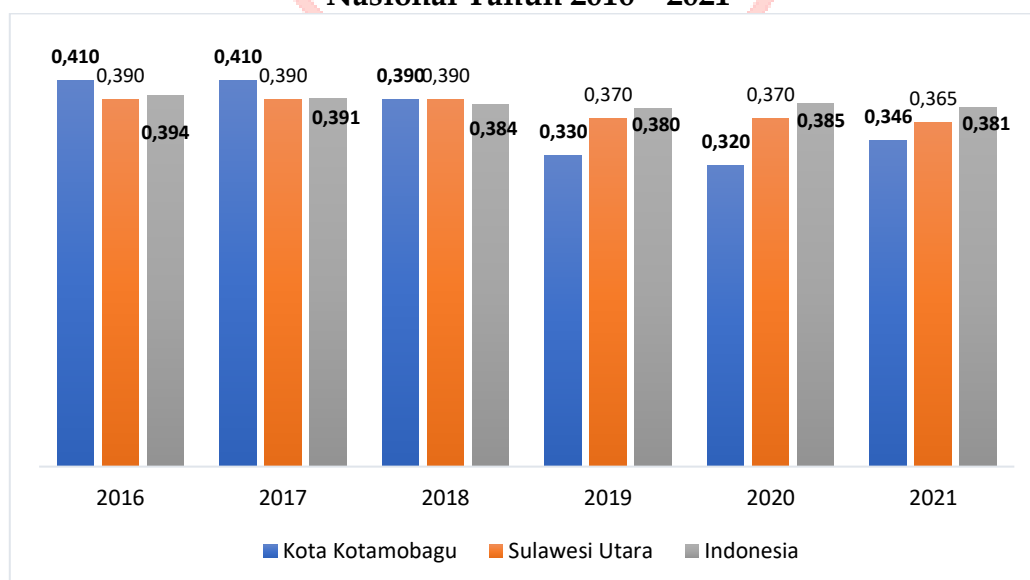
Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, koefisien gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan. Koefisien gini didasarkan pada Kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi uniform seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Dimana nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai indeks gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau

semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Terjadinya pemerataan sempurna dilihat dari indeks gini bernilai 0 (nol), sementara ketimpangan sempurna dilihat dari hasil indeks gini bernilai 1 (satu). Standar penilaian ketimpangan *gini ratio* ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- $GR < 0,4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah,
- $0,4 < GR < 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat),
- $GR > 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

Gambar menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, gini ratio di Kota Kotamobagu berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional. Angka *gini ratio* berada di nilai $< 0,4$ yang berarti ketimpangan pendapatan di Kota Kotamobagu tergolong rendah.

Gambar 3.6
Perbandingan Gini Ratio Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2016 - 2021





World Bank mengklasifikasikan negara yang berpendapatan kurang dari US\$ 1.045 sebagai negara berpendapatan rendah. Sementara negara yang memiliki pendapatan perkapita antara US\$ 1.045-4.125 termasuk negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income), negara berpendapatan perkapita antara US\$ 4.125-12.746 dikategorikan sebagai negara yang memiliki pendapatan menengah tinggi (upper middle income). Negara berpendapatan perkapita tinggi adalah negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari US\$ 12.746.

Tabel 3.6.
PDRB per Kapita Kota Kotamobagu Tahun 2018 - 2022

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion Rupiahs)					
	2018	2019	2020	2021*	2022**
- ADHB/ at current price	3335	3694	3791	4032	4413
- ADHK/ at 2010 Constant Price	2254	2392	2397	2498	2627
PDRB per Kapita/GRDP per Capita (Juta Rupiah/Million Rupiahs)					
- ADHB/ at current price	26,42	28,88	30,69	32,39	35,19
- ADHK/ at 2010 Constant Price	17,86	18,70	19,41	20,07	20,94
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (Persen)/ Growth of GRDP per Capita at 2010 Constant Price (Percent)	4,69	4,69	3,78	3,42	4,36

Perkembangan PDRB perkapita Kotamobagu selama periode waktu 2018-2022 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Selama periode waktu lima tahun terakhir, PDRB per kapita menunjukkan laju pertumbuhan yang fluktuatif. Walaupun begitu, PDRB per kapita terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hingga mencapai angka 35,19 juta rupiah pada tahun 2022. Meskipun angka ini dirasa tinggi namun jika diukur dalam US\$, PDRB perkapita Kotamobagu masih termasuk dalam kategori kota berpendapatan menengah bawah. Sementara jika dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, yang mempertimbangkan laju inflasi, pertumbuhan



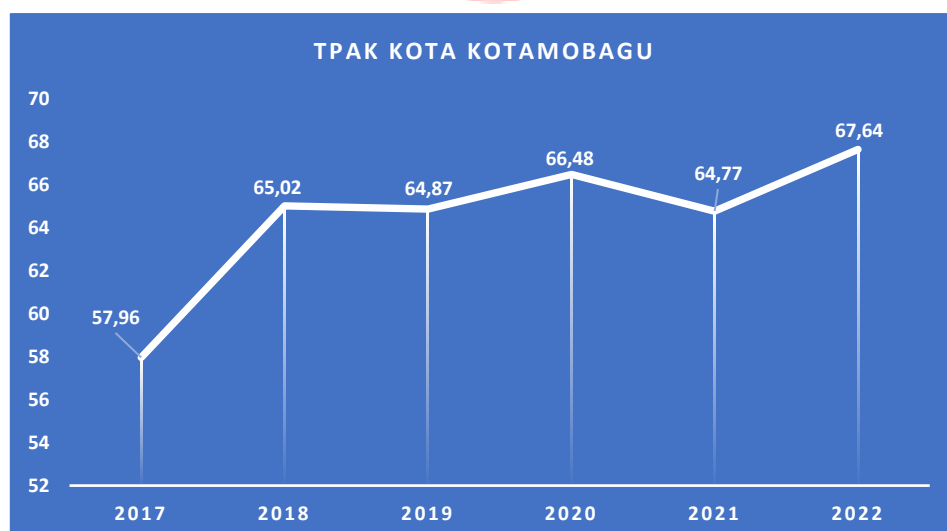
PDRB perkapita Kota Kotamobagu selama 5 tahun terakhir relatif lebih lambat, yaitu hanya sebesar 3-4 persen.

3.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK ini merupakan indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/provinsi/kabupaten/kota.

Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi Angkatan kerja juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan faktor demografis. Beberapa faktor demografis yang cenderung berpengaruh adalah jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan.

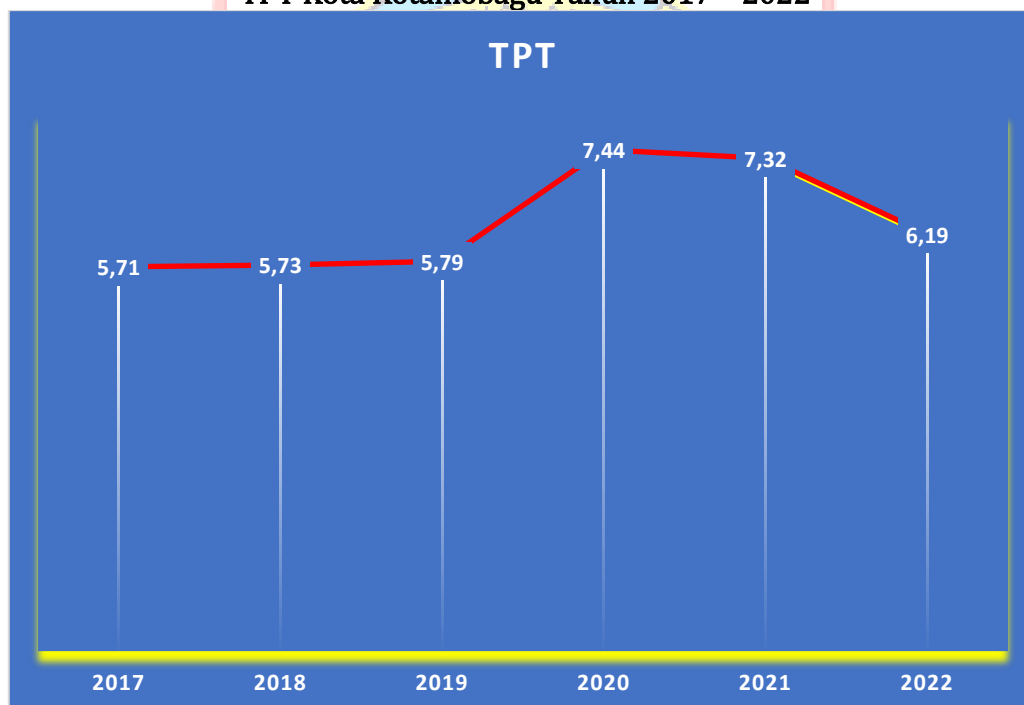
Gambar 3.7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Kotamobagu Tahun 2017 -2022



TPAK Kota Kotamobagu cenderung berfluktuasi sejak tahun 2017. Gambar 2.4 menunjukkan bahwa TPAK selang tahun 2017 - 2022 cenderung meningkat , walaupun terjadi penurunan pada tahun 2019 (dari 65,02 % tahun 2018 menjadi 64,87%) dan tahun 2021 (turun dari 66,48 % tahun 2020 menjadi 64,77%).

TPAK tahun 2017 sebesar 57,96 % meningkat menjadi 67,64% di tahun 2022 atau terjadi kenaikan TPAK sebesar 9,68 %. Jika dirata-ratakan maka terdapat pertumbuhan TPAK sebesar 1,6% di Kota Kotamobagu dalam 6(enam) tahun terakhir.

Gambar 3.8
TPT Kota Kotamobagu Tahun 2017 – 2022



Dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir angka TPT Kota Kotamobagu telah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Namun pada tahun 2020 angka TPT sangat tinggi yakni 7,44 persen. Dengan berbagai program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota kotamobagu akhirnya menunjukan capaian yang positif, ini

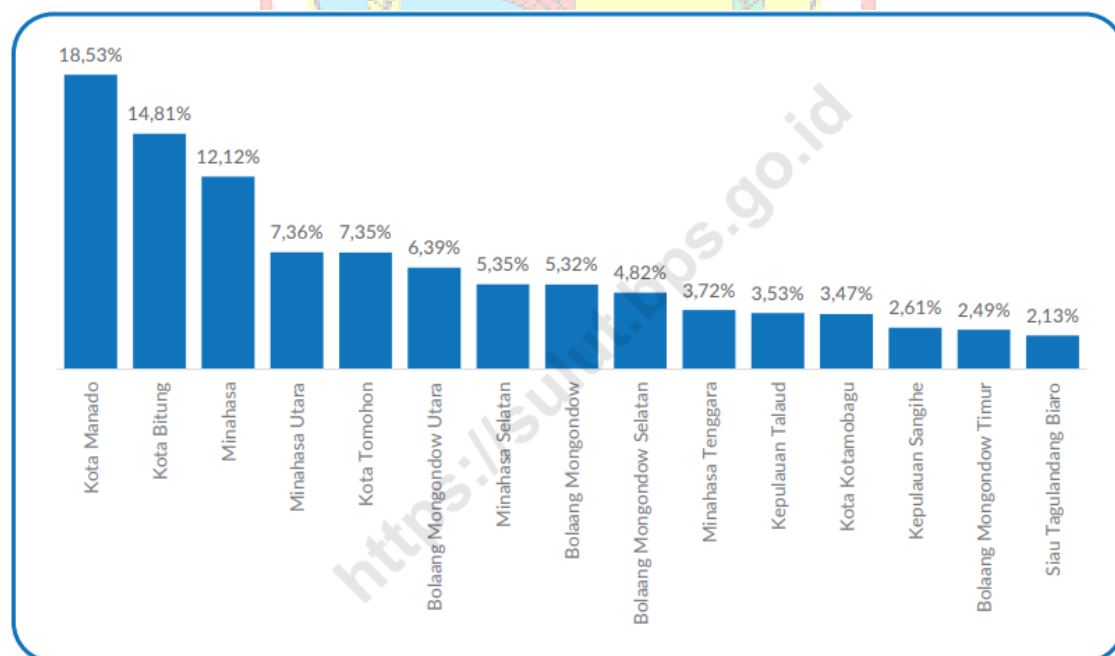
ditunjukkan pada capaian TPT Tahun 2021 menurun menjadi 7,32 persen. Angka TPT di Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini merupakan dampak adanya pandemic Covid-19.

Isu menarik lainnya yang berhubungan dengan kemiskinan adalah pola migrasi atau perpindahan penduduk di wilayah Sulawesi Utara. Volume dan arus migrasi penduduk semakin meningkat dengan adanya pembangunan daerah, selanjutnya migrasi antar kabupaten kota dapat dilihat pada gambar 3.9.

Data menunjukkan mereka dari luar provinsi Sulawesi Utara yang masuk bermigrasi ke Kota Kotamobagu adalah sebesar 3,47% atau 4 (empat) terendah yang menjadi tujuan utama migrasi risen.

Gambar 3.9.

Migrasi Risen Antar Provinsi Menurut Kabupaten Kota Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya pada tabel 3.7 menunjukkan Secara rinci kondisi jumlah migran risen menurut kabupaten kota. Sedangkan jika dilihat dari jumlah migran risen



menurut kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, ternyata di Kota Kotamobagu terdapat migran keluar hanya 3.521 orang sedangkan migran yang masuk mencapai 3.905 orang. Artinya terdapat 384 orang migran risen yang ada di Kota Kotamobagu berasal dari kabupaten kota lainnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 3.7.

Migrasi Risen Antar Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

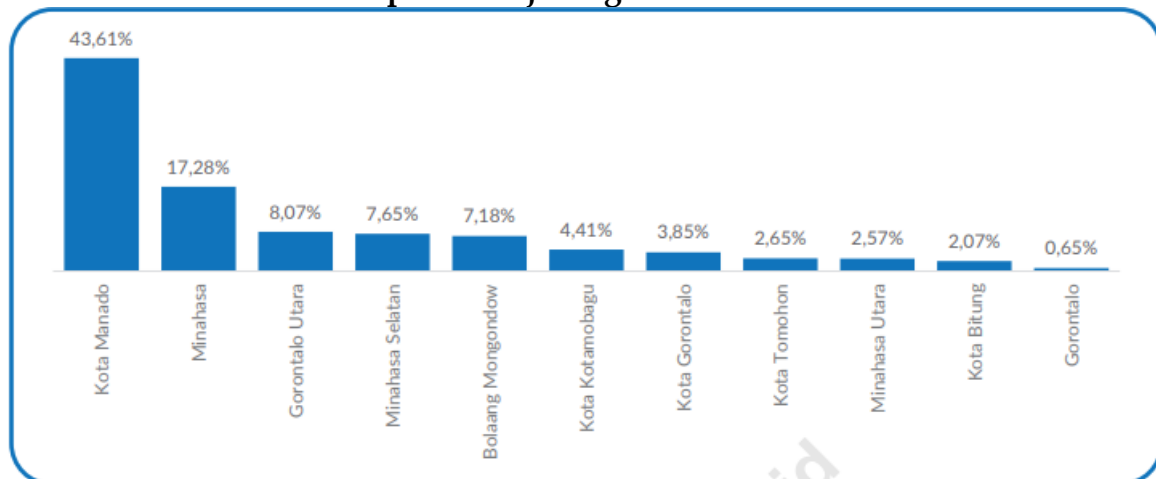
Kabupaten/Kota Tempat Tinggal	Migran Masuk	Migran Keluar	Neto
(1)	(2)	(3)	(4)
Bolaang Mongondow	5 429	5 104	325
Minahasa	10 043	7 176	2 867
Kepulauan Sangihe	2 844	2 766	78
Kepulauan Talaud	4 202	1 405	2 797
Minahasa Selatan	5 117	3 499	1 618
Minahasa Utara	8 008	3 641	4 367
Bolaang Mongondow Utara	3 628	1 321	2 307
Siau Tagulandang Biaro	2 432	1 130	1 302
Minahasa Tenggara	3 361	1 712	1 649
Bolaang Mongondow Selatan	2 401	1 869	532
Bolaang Mongondow Timur	3 431	1 498	1 933
Kota Manado	9 017	32 636	(23 619)
Kota Bitung	7 253	6 483	770
Kota Tomohon	4 623	2 178	2 445
Kota Kotamobagu	3 905	3 521	384
Total	75 693	75 939	(246)

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara

Akses transportasi antar wilayah perkotaan dan perdesaan sudah lebih baik menyebabkan penurunan biaya transportasi disatu sisi dan menyebabkan munculnya fenomena pekerja *commuter* yang melakukan perjalanan pulang pergi antar kota/kabupaten di wilayah Sulawesi Utara. Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan terdapat 4,41% pekerja migran *commuter* yang bekerja di Kota Kotamobagu, artinya pekerja migran *commuter* yang bekerja di Kota Kotamobagu menggunakan jasa transportasi darat melakukan perjalanan pulang pergi dari tempat tinggal menuju lokasi kerja. Jika dianalisa lebih jauh pekerja migran *commuter* yang bekerja di Kota

Kotamobagu berasal dari daerah sekitarnya atau dari daerah BMR (Bolaang Mongondow Raya).

Gambar 3.10.
Persentase Penduduk Migran yang Melakukan Commuter Berdasarkan Lokasi Tempat Bekerja Migrasi Tahun 2022



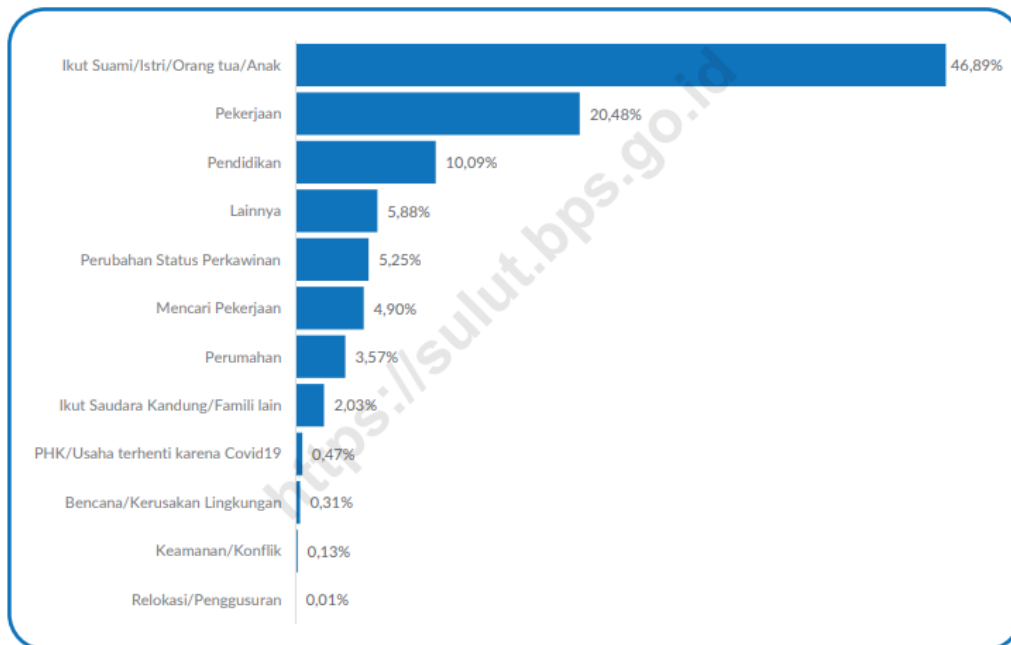
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara

Sebaliknya terdapat 7.18% pekerja migran *commuter* yang bekerja di Kabupaten Bolaang Mongondow, artinya pekerja migran *commuter* menggunakan jasa transportasi darat melakukan perjalanan pulang pergi dari tempat tinggal menuju lokasi kerja. Jika dianalisa lebih jauh pekerja migran *commuter* yang bekerja di Kabupaten Bolaang Mongondow berasal dari daerah sekitarnya atau salah satunya dari daerah Kota Kotamobagu. Terdapat 2,77% pekerja dan keluarganya berada di Kota Kotamobagu bekerja di luar daerah, yang memiliki resiko meningkatkan masalah ketenagakerjaan jika anggota keluarga mereka atau kepala keluarga yang bekerja kehilangan pekerjaannya.

Faktor pendorong yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan migrasi atau motif migrasi ada 12 alasan yang berbeda yaitu alasan pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, alasan pendidikan, perubahan status perkawinan, mengikuti suami/ istri/ orang tua/ anak, mengikuti saudara kandung atau famili lain, alasan perumahan,

alasan keamanan/ konflik, relokasi/ penggusuran, bencana atau kerusakan lingkungan, PHK atau alasan lainnya.

Gambar 3.11.
Persentase Migran Risen Berdasarkan Motif Melakukan Migrasi
di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara

Data pada gambar 3.11 menunjukkan bahwa motif terbesar atau 46,89% melakukan migrasi karena mengikuti suami/ istri/ orang tua/ anak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keluarga menjadi faktor yang mempunyai peranan penting dalam melakukan perpindahan dan salah satunya memilih pindah tinggal di Kota Kotamobagu. Dan terdapat resiko PHK sebesar 0,47% yang membuat terjadinya migrasi ke Kota Kotamobagu.



4.1. KONDISI KEMISKINAN

a. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi, dan kemiskinan ini dari tahun ke tahun terus menjadi isu ditingkat global, nasional bahkan lokal dan sepertinya tidak pernah tuntas sehingga diperlukan perhatian oleh banyak pihak dan menjadi prioritas utama pembangunan untuk pengentasannya.

Kemiskinan tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keberdayaan dalam hal terpenuhinya hak-hak dasar, seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan, air bersih, dan lain sebagainya. Kemiskinan telah dirumuskan dan menjadi tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang menempatkan isu tentang pemberantasan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan yang harus tercapai pada tahun 2030. Isu-isu pembangunan di Indonesia juga menempatkan kemiskinan, ketidakmerataan antar golongan, disparitas regional, dan kekerasan sosial sebagai isu yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang di tahun 2030.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut



garis kemiskinan (makanan & bukan makanan) dan secara umum kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang di pakai di Indonesia oleh BPS dan menyatakan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin menghitung Garis Kemiskinan (GK) nasional yang kemudian menjadi ukuran pencapaian setiap tahun.

b. Kondisi Kemiskinan

- **Jumlah Penduduk Miskin**

Kemiskinan menurut BPS menggunakan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Kegunaannya adalah menunjukkan apakah jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal dapat berkurang tiap tahunnya, dilihat dari penduduk yang pengeluaran per kapita per bulannya di atas garis kemiskinan



Tabel 4.1
Perkembangan Garis Kemiskinan Jumlah Penduduk Miskin dan
Persentase Penduduk Miskin Kota Kotamobagu 2011-2022

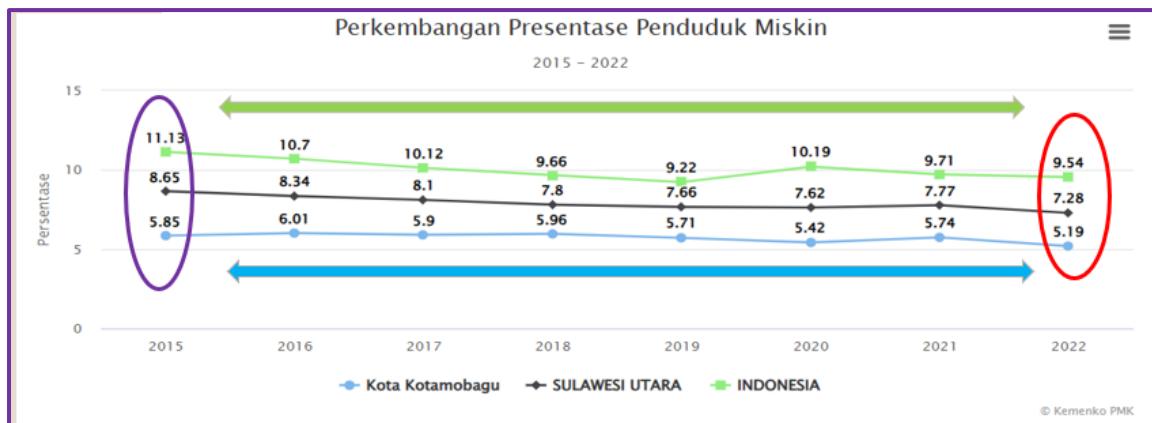
Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	232 417	6,6	5,85
2012	235 763	6,9	5,98
2013	237 521	6,76	5,75
2014	255 330	6,95	5,85
2015	274 103	7,24	6,01
2016	289 077	7,28	5,9
2018	298 742	7,49	5,96
2019	323 292	7,31	5,71
2020	343 675	7,06	5,42
2021	363 777	7,566	5,74
2021	353 872,00	4,,47	6,1

Garis Kemiskinan (GK) di Kota Kotamobagu meningkat dari tahun 232.417 rupiah tahun 2011 menjadi 353.872 rupiah tahun 2022 atau terjadi peningkatan GK sebesar 52,25 %. Persentase penduduk miskin meningkat dari 5,85% tahun 2011 menjadi 6,1% tahun 2022 atau P0 meningkat sebesar 4,27%. Sedangkan jumlah penduduk miskin justru turun dari 6,6 ribu jiwa tahun 2011 menjadi 4,47 jiwa pada tahun 2022.

Analisis Antar Waktu menunjukkan selang tahun 2015 – 2022 bahwa persentase penduduk miskin Kota Kotamobagu lebih rendah dari provinsi dan nasional. Begitu

juga persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara juga masih lebih rendah dari Nasional.

Gambar 4.1
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi
dan Kota Kotamobagu Tahun 2015 - 2022



Nasional selang tahun 2015 - 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1,59%, Provinsi turun sebesar 1,37% dan Kota Kotamobagu turun sebesar 0,66%. Penurunan kemiskinan di tingkat nasional lebih tinggi diikuti provinsi dan paling rendah percepatan penurunan P0 adalah Kota Kotamobagu.

- **Kualitas Kemiskinan (P1 dan P2)**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Kegunaan dari nilai agregat dari poverty gap index menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat.

Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 4.2
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Kotamobagu 2012-2022

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan <i>Poverty Gap Index</i>	Indeks Keparahan Kemiskinan <i>Poverty Severity Index</i>
(1)	(2)	(3)
2012	0,81	0,16
2013	0,4	0,05
2014	0,44	0,05
2015	0,58	0,1
2016	0,63	0,12
2017	0,67	0,17
2018	0,57	0,09
2019	0,68	0,13
2020	0,84	0,16
2021	1,32	0,39



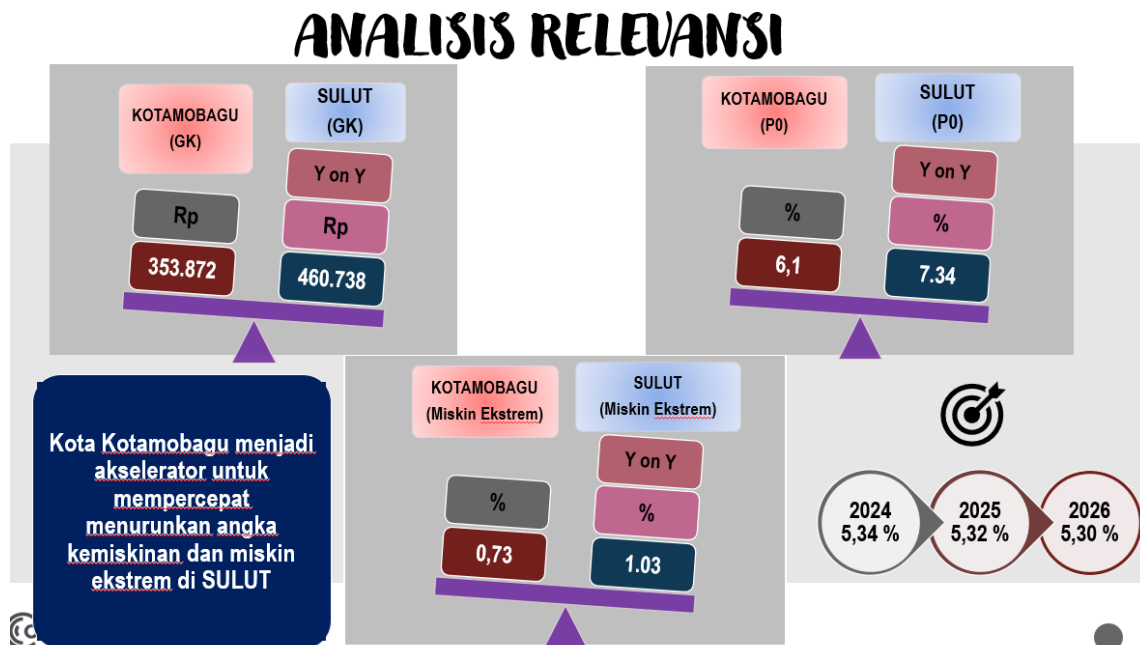
Indeks Keparahan kemiskinan kegunaannya memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Data menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan (P1) meningkat dari 0,81 tahun 2012 menjadi 1,32 tahun 2021 atau naik sebesar 0,51 poin. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) naik dari 0,16 tahun 2012 menjadi 0,39 pada tahun 2021, atau naik sebesar 0,23 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan kualitas kemiskinan untuk P1 lebih besar dari P2.

Analisis relevansi menunjukkan bahwa Kota Kotamobagu memiliki persentase penduduk miskin dan miskin ekstrem lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara justru lebih tinggi dari Kota Kotamobagu. Ini berarti untuk P0 dan miskin ekstrem, Kota Kotamobagu adalah akselerator bagi pencapaian penurunan angka kemiskinan dan miskin ekstrem Provinsi Sulawesi Utara,

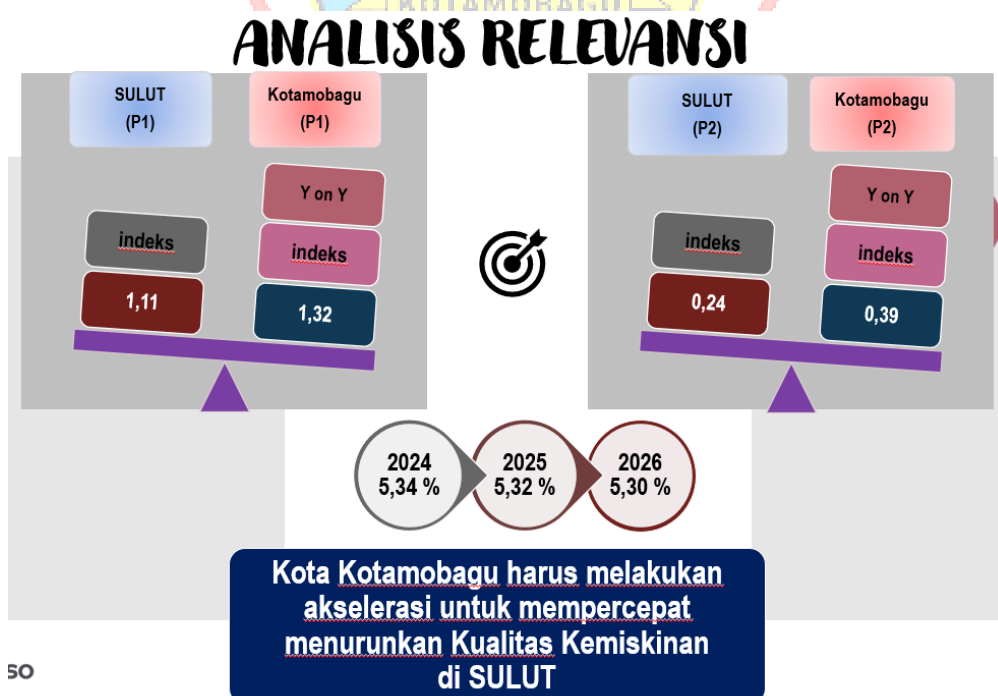
Jika melihat target kemiskinan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kotamobagu tahun 2024 angka kemiskinan diharapkan akan turun menjadi 5,34%, tahun 2025 turun lagi menjadi 5,32% dan di akhir RPD persentase penduduk miskin terus turun sampai menjadi 5,30%.

Gambar 4.2
Analisis Relevansi Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrem



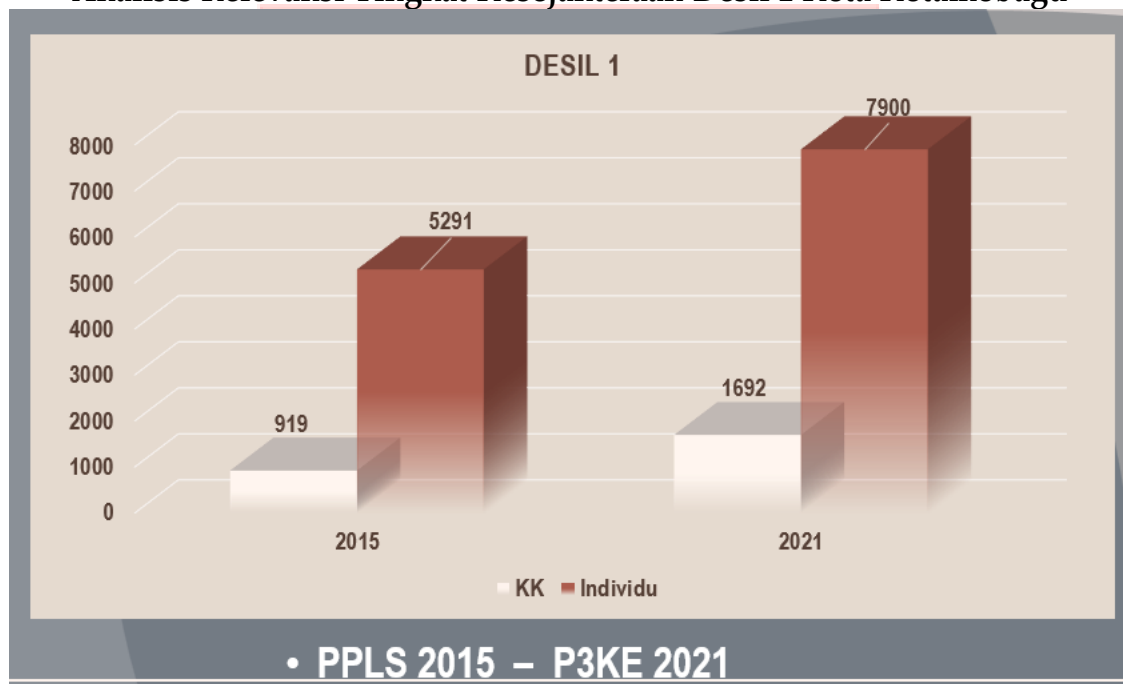
Analisis relevansi untuk kualitas kemiskinan dapat dilihat pada gambar 4.3.

Gambar 4.3
Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan



Analisis relevansi menunjukkan bahwa Kota Kotamobagu memiliki kualitas kemiskinan baik indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan yang lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Utara. Artinya pemerintah Kota Kotamobagu harus mengakselerasi penurunan P1 dan P2 untuk bisa menopang percepatan penanggulangan kualitas kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara

Gambar 4.3
Analisis Relevansi Tingkat Kesejahteraan Desil 1 Kota Kotamobagu



Berdasarkan data PPLS 2015 yang menjadi dasar DTKS dan P2KE tahun 2021 yang menjadi dasar analisis kemiskinan ekstrem menunjukkan bahwa terdapat relevansi peningkatan jumlah individu miskin di Desil 1 dari 5291 individu atau 919 rumah tangga menjadi 7900 individu atau 1.692 rumah tangga.



4.2. KONDISI KEMISKINAN EKSTREM

Kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.

Tabel 4.3
Jumlah Desil 1 P3KE Kota Kotamobagu

Sebaran Desil 1 di Sulawesi Utara, Kota Kotamobagu		
Kecamatan	keluarga desil 1	individu desil 1
Kotamobagu Timur	496	2,206
Kotamobagu Barat	568	2,755
Kotamobagu Selatan	345	1,623
Kotamobagu Utara	283	1,316

Kemiskinan ekstrem atau juga disebut kemiskinan absolut ini tidak hanya bergantung pada pendapatan, tetapi ketersediaan jasa. Pada tahun 2018, kemiskinan ekstrem mengacu pada pendapatan di bawah garis kemiskinan internasional USD1,90 per hari (nilai pada tahun 2011) menurut Bank Dunia. Nilai ini setara dengan USD2,12 pada tahun 2022.

Berdasar data pada tabel diatas nampak bahwa jumlah keluarga desil 1 dan individu desil 1 yang paling banyak terdapat di Kecamatan Kotamobagu Timur. Jumlah individu Desil 1 adalah sebesar 7900 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin tahun 2022 adalah sebanyak 4.470 jiwa. Artinya hanya 56,58 % individu Desil 1 yang masuk pada kelompok penduduk miskin sisanya adalah rentan miskin.



Menurut BPS jumlah penduduk miskin ekstrem Kota Kotamobagu tahun 2021 adalah 0,73 % atau 903 individu. Penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui upaya khusus berupa multiple interventions. Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama yaitu: pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan. Upaya percepatan dilakukan di wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan, mengingat kemiskinan ekstrem banyak terdapat di wilayah tersebut.

Di tingkat daerah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 dalam melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.



BAB V

ANALISIS DATA LANDAS TERINTEGRASI DAERAH

Analisis data landas terintegrasi menggambarkan data rumah tangga/ individu miskin dan miskin ekstrem yang menjadi target penerima manfaat di Kota Kotamobagu. Jika dilihat dari target penerima manfaat program kemiskinan by name by NIK adalah mereka yang masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

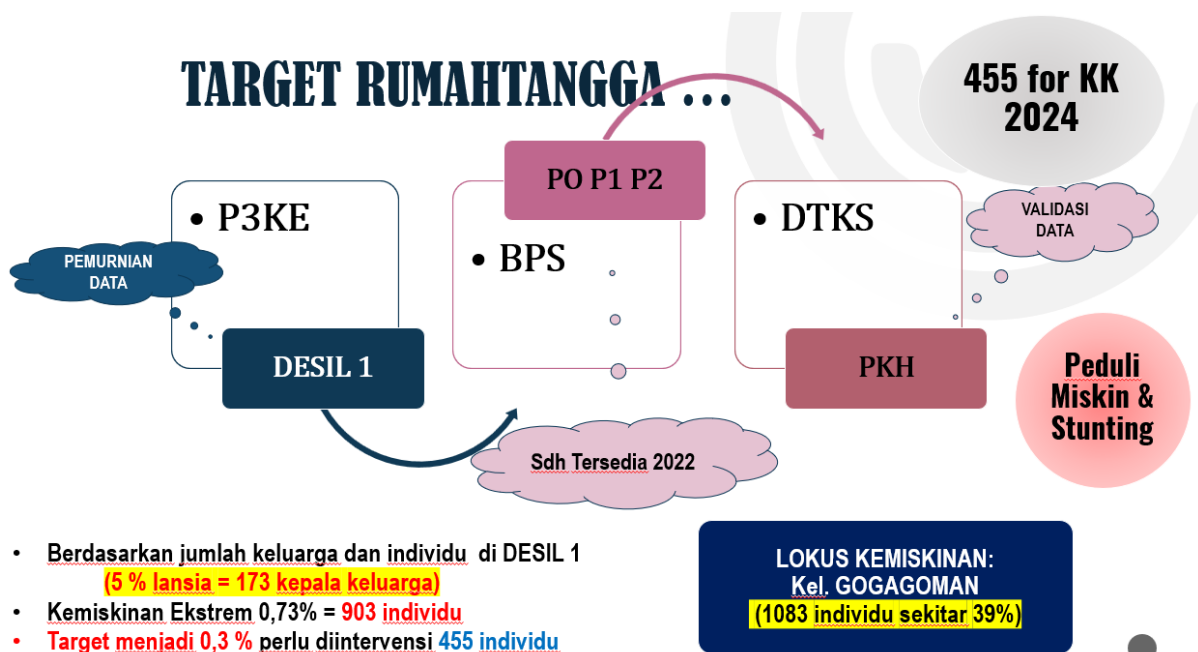
Gambar 5.1
Target Penerima Manfaat Program Kemiskinan

📌 TARGET / SASARAN by name by NIK



Menurut dimensi kemiskinan bisa dilihat bahwa masing-masing dimensi memiliki target / sasaran penerima manfaat untuk program penanggulangan kemiskinan daerah. Desil 1 menjadi target jika alokasi anggaran terbatas dan lebih mengarah kepada mereka yang miskin dan miskin ekstrem.

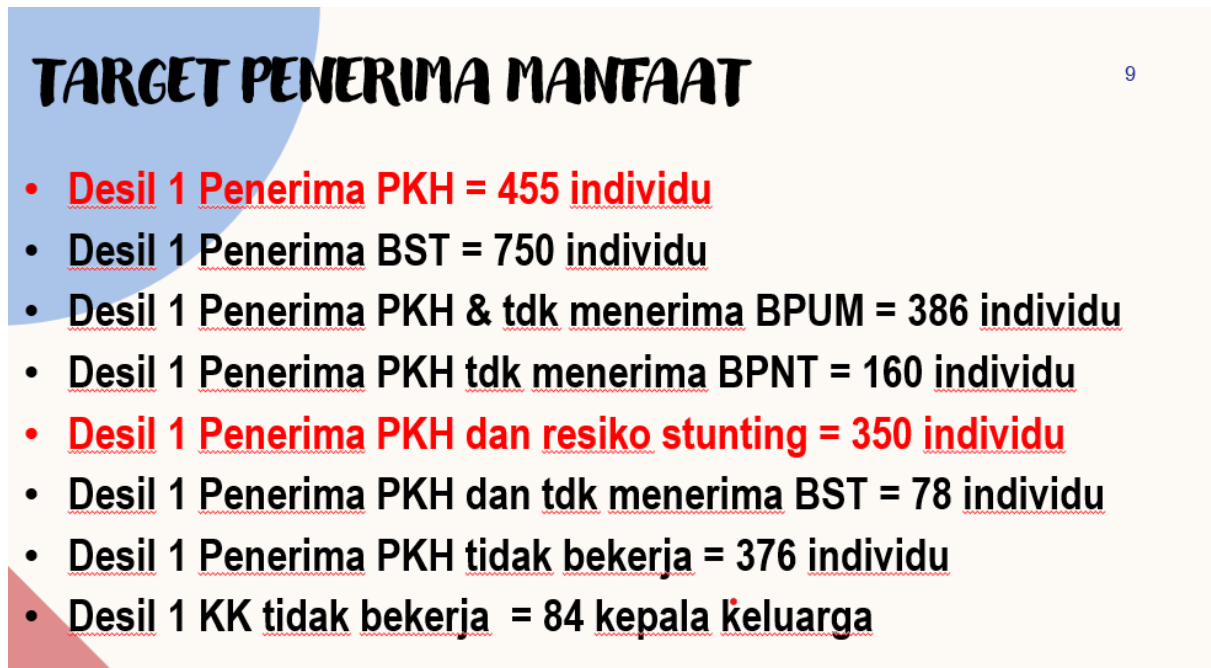
Gambar 5.2
Target Pemurnian Data



Berdasar data BPS jumlah penduduk miskin tahun 2022 adalah sebanyak 4.470 jiwa, pemurnian data landas terintegrasi dilakukan di Desil 1 DTKS / P3KE. Desil 1 P3KE menunjukkan terdapat 173 kepala keluarga lansia, dan 39% atau 1.083 individu terdapat di Kelurahan Gogagoman. Dasar pemurnian data adalah peduli miskin dan stunting sehingga pemurnian data dimulai dengan mengidentifikasi individu yang menerima PKH.

Data Landas Terintegrasi Kota Kotamobagu menetapkan 455 individu dimana mereka adalah individu Desil 1 yang menerima PKH. Teridentifikasi bahwa individu di desil 1 yang menerima BST ada 750 orang.

Gambar 5.3
Identifikasi Data P3KE Desil 1



Mereka yang menerima PKH dan beresiko stunting mencapai 350 individu. Selanjutnya Kepala Keluarga (KK) yang tidak bekerja mencapai 84 kepala keluarga. Secara rinci identifikasi desil 1 yang menjadi target penerima manfaat program kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Tabel 5.1
Data Landas Penerima Manfaat Program Kemiskinan

Kecamatan	PKH	Desil 1	%
Kotamobagu Selatan	105	1.623	6,47
Kotamobagu Timur	111	2.206	5,03
Kotamobagu Barat	155	2.755	5,63
Kotamobagu Utara	84	1.316	6,38
JUMLAH	455	7.900	5,76

Data landas terintegrasi miskin ekstrem tersebar di 4 (empat) kecamatan dengan proporsi dari desil 1 terbesar adalah di Kecamatan Kotamobagu Selatan



mencapai 105 individu atau 6,47%. Sedangkan jika dilihat dari jumlahnya yang paling banyak di Kecamatan Kotamobagu Barat mencapai 34,06%.

Tabel 5.2
Data Landas Penerima Manfaat Program Kemiskinan
di Kecamatan Kotamobagu Barat

No	DESA/KELURAHAN	JUMLAH
	KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT	
1.	KELURAHAN GOGAGOMAN	49
2.	KELURAHAN KOTAMOBAGU	13
3.	KELURAHAN MOGOLAING	28
4.	KELURAHAN MOLINOW	48
5.	KELURAHAN MONGKONAI	4
6.	KELURAHAN MONGKONAI BARAT	13
	TOTAL	155

Jika dilihat menurut kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Barat yang terbanyak terdapat di Kelurahan Gogagoman.

Tabel 5.3
Data Landas Penerima Manfaat Program Kemiskinan
di Kecamatan Kotamobagu Selatan

No	DESA/KELURAHAN	JUMLAH
	KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN	
1	DESA BUNGKO	14
2	DESA KOPANDAKAN SATU	17
3	DESA POYOWA BESAR SATU	5
4	DESA POYOWA BESAR DUA	1
5	DESA POYOWA KECIL	6
6	DESA TABANG	22
7	KELURAHAN MOGONDOW	12
8	KELURAHAN POBUNDAYAN	11
9	KELURAHAN MOTOBOI KECIL	17
	TOTAL	105

Jika dilihat menurut desa/kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Selatan yang terbanyak terdapat di Desa Tabang.



Tabel 5.4
Data Landas Penerima Manfaat Program Kemiskinan
di Kecamatan Kotamobagu Timur

No	DESA/KELURAHAN	JUMLAH
	KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR	
1	DESA KOBO KECIL	17
2	DESA MOYAG	16
3	DESA MOYAG TODULAN	10
4	DESA MOYAG TAMPOAN	9
5	KELURAHAN KOTOBANGUN	25
6	KELURAHAN KOBO BESAR	
7	KELURAHAN MOTOBOI BESAR	11
8	KELURAHAN TUMUBUI	19
9	KELURAHAN MATALI	1
10	KELURAHAN SININDIAN	3
	TOTAL	111

Jika dilihat menurut desa/kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Timur yang terbanyak terdapat di Kelurahan Kotobangun.

Tabel 5.5
Data Landas Penerima Manfaat Program Kemiskinan
di Kecamatan Kotamobagu Utara

No	DESA/KELURAHAN	JUMLAH
	KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA	
1.	DESA BILALANG SATU	17
2.	DESA BILALANG DUA	20
3.	DESA PONTODON	1
4.	DESA PONTODON TIMUR	3
5.	DESA SIA'	2
6.	KELURAHAN UPAI	13
7.	KELURAHAN BIGA	10
8.	KELURAHAN GENGGULANG	18
	TOTAL	84

Jika dilihat menurut desa/kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Utara yang terbanyak terdapat di Desa Bilalang Dua.



6.1. STRATEGI & KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kebijakan pemerintah Kota Kotamobagu sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi sehingga program dan kegiatan pun terintegrasi. Terutama dalam mengatasi dampak pandemi COVID 19, melalui PERLINSOS PEN untuk prioritas nasional dan ODSK untuk prioritas provinsi. Untuk memastikan tercapainya target penghapusan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, diperlukan kebijakan pendukung terkait:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui:
 - a. kemudahan berusaha seperti perizinan untuk investasi yang mendorong kesempatan kerja untuk masyarakat miskin ekstrem, miskin dan rentan;
 - b. stabilitas harga komoditas bahan pokok untuk memastikan inflasi terkendali;
 - c. peningkatan daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin ekstrem, miskin dan rentan;
 - d. pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan pekerja;



- e. penetapan protokol kesehatan yang terus diperketat dan perluasan cakupan vaksinasi.
2. Penyediaan data sasaran program yang mutakhir, akurat, dan berdasarkan status/tingkat kesejahteraan, antara lain melalui:
 - a. pemanfaatan data sasaran yang sudah tersedia;
 - b. validasi identitas penduduk berbasis NIK;
 - c. pendataan penduduk berdasarkan nama, lokasi dan tingkat kesejahteraan;
 - d. pendaftaran mandiri;
 - e. integrasi berbagai jenis dan sumber data sosial dan ekonomi, baik data keluarga maupun data UMKM; dan
 - f. selama belum tersedianya data yang termutakhirkan dan memiliki pemeringkatan status/tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk, maka dapat menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
3. Pelaksanaan keterpaduan dan sinergi program lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain, melalui:
 - a. koordinasi lintas kementerian/lembaga dipimpin oleh Menteri Koordinator;
 - b. koordinasi terhadap kebijakan Gubernur dan Wali Kota dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - c. Gubernur memimpin secara langsung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat provinsi dengan TKPK Provinsi;
 - d. Bupati/Wali Kota memimpin secara langsung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat Kabupaten/Kota dengan perangkat TKPK;
 - e. penggunaan sumber data mutakhir yang sama sampai pada individu dan/atau keluarga penerima manfaat program; dan



- f. integrasi dan harmonisasi skema pendanaan dari nonpemerintah (swasta dan masyarakat) dengan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
4. Peningkatan keterpaduan dan sinergi program berbasis pada kebutuhan penduduk, antara lain melalui:
 - a. pemenuhan bantuan sosial dan jaminan sosial seluruh penduduk dan dipastikan miskin ekstrem tercakup di dalamnya;
 - b. pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas dan dipastikan miskin ekstrem tercakup di dalamnya;
 - c. pemenuhan pelayanan dasar dan dipastikan miskin ekstrem tercakup di dalamnya.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Pusat dan Daerah serta layanan terstandarisasi, melalui:
 - a. peningkatan kapasitas aparatur pusat dan daerah.
 - b. peningkatan pengetahuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar.
6. Perencanaan, penganggaran, penentuan target, dan pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang inklusif, melalui:
 - a. pelibatan kelompok pemuda dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia, dan kelompok adat;
 - b. memastikan kesetaraan gender; dan
 - c. pelaksanaan forum tematik kelompok rentan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan.

Beberapa strategi dan arah kebijakan menurut dimensi kemiskinan dalam menanggulangi kemiskinan :

Gambar 6.1.

Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Kesejahteraan



Dimensi kesejahteraan terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kemiskinan esktrim yang masuk dalam Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem). Sehingga arah kebijakan pemerintah pusat sampai daerah adalah dalam rangka upaya menjaga dan mengembalikan tingkat kesejahteraan yang hilang saat pandemi C19.

Gambar 6.2.

Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Pendidikan



Dimensi pendidikan terutama untuk anak usia sekolah yang tidak sekolah dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data P3KE. Sehingga arah kebijakan pemerintah pusat sampai daerah adalah dalam rangka upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah dan menurunkan angka putus sekolah

Gambar 6.3.
Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Kesehatan



Dimensi Kesehatan lebih berupaya untuk meningkatkan pemerataan layanan Kesehatan untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin.

Gambar 6.4.
Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Ketenagakerjaan



Dimensi ketenagakerjaan terutama untuk penduduk produktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak bekerja dan Data P3KE.

Gambar 6.5
Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Kependudukan



Dimensi kependudukan menjadi sangat penting untuk menjamin hak sipil masyarakat miskin, rentan miskin dan miskin ekstrem sehingga bisa menerima manfaat berbagai program pemerintah dan non pemerintah.

Gambar 6.6.
Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi Hidup Layak





Dimensi hidup layak akan mengembalikan kualitas hidup rumah tangga miskin, rentan miskin dan miskin ekstrem di Kota Kotamobagu di masa pasca pandemi COVID 19.

6.2. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Permendagri nomor 53 tahun 2020 tentang prinsip penanggulangan kemiskinan menetapkan 4 (empat) strategi utama (pasal 17) yaitu ;

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
- b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
- c. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- d. Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan ekstrem memiliki tiga strategi dan 3 (tiga) program prioritas yaitu
1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; 2. Peningkatan pendapatan dan
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan terdiri atas (pasal 18) :

- A. Program bantuan sosial dan jaminan sosial berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- B. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan



C. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/ dana kelurahan.

Pasal 19 menetapkan sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan (NIK). Saat ini bantuan dari pemerintah pusat untuk bantuan iuran sesuai SK Menteri Sosial Nomor 170 Tahun 2017 yaitu Program PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Program berbasis keluarga yang diberikan kepada keluarga pra sejahtera untuk PBI dan keluarga sangat miskin untuk PKH.

Program PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini dalam jangka pendek bertujuan untuk mengurangi beban RTSM / miskin ekstrem dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutuskan rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi selanjutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Kotamobagu berkomitmen untuk menyediakan dana APBD setiap tahun anggaran untuk program-program pembangunan yang secara langsung menyentuh kepentingan-kepentingan masyarakat, terlebih khusus masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:



(i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat;

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, di antaranya melalui : a. bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar; b. bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler, dan Bantuan Beras; c. bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia); d. subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji; dan e. pemberian Bantuan Iuran Jaminan sosial Kesehatan Nasional (JKN).

(ii) peningkatan pendapatan masyarakat;

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya melalui: a. peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Padat Karya Tunai/PKT (desa dan sektor); b. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, seperti kartu prakerja, program vokasi; c. peningkatan Kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha; dan d.



peningkatan Akses Pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

(iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui: a. pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan b. peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Berdasarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan, maka program dan kegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Program Kemiskinan Menurut Urusan Pemerintahan/ Bidang
di Kota Kotamobagu

URUSAN PEMERINTAHAN /BIDANG	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya APM, APK dan HLS	Pengelolaan Pendidikan dasar	APM SD; APK SD, HLS	Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Pendidikan Menengah	APM SMP, APK SMP, HLS	Dinas Pendidikan
			Pengelolaan PAUD	APM PAUD, APK PAUD, HLS	Dinas Pendidikan
KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)	Menurunnya AKI, AKB, Gizi Buruk	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM & UKP	cakupan layanan kesehatan bagi individu dlm P3KE	Dinas Kesehatan



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024-2026**

	& UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)		Penyediaan layanan kesehatan utk UKM & UKP rujukan	Jml individu dlm P3KE	Dinas Kesehatan
PERUMAHAN & PERMUKIMAN	PROGRAM PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya kualitas air minum	Pengelolaan & pengembangan SPAM	Cakupan RT dlm P3KE	Dinas PUPR & PERKIM
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman	Cakupan RT dlm P3KE	Dinas PUPR & PERKIM
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya kualitas perumahan	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	RTLH	Dinas PUPR & PERKIM
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Menurunnya kawasan permukiman kumuh	Peningkatan kawasan permukiman kumuh dgn luas di bawah 10 Ha	Luas permukiman kumuh	Dinas PUPR & PERKIM
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya kualitas perumahan	Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan tersedianya PSU bagi masyarakat miskin & rentan miskin	Dinas PUPR & PERKIM
PEMBANGUNAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	IDM	Pemberdayaan desa/kel dan masyarakat	jml desa/kel	Dinas PMD
KETENAGAKERJAAN	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kualitas tenaga kerja dan TPAK	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	jml AK dlm P3KE	Disnaker
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kualitas tenaga kerja dan TPAK	Pelayanan antar kerja	Cakupan AK dlm P3KE	Disnaker
KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN & KEMANDIRIAN PANGAN	IKP dan PPH	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	cakupan RT dlm P3KE	DKP
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	IKP dan PPH	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan	cakupan RT dlm P3KE	DKP



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024-2026**

			lainnya sesuai kebutuhan		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	IKP dan PPH	Penanganan kerawanan pangan	cakupan RT dlm P3KE	DKP
PERTANIAN & PERKEBUNAN	PROGRAM PENYEDIAAN & PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan	Penyediaan benih/bibit	jumlah bibit/ benih	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	cakupan RT dlm P3KE	DINAS PERTANIAN
KELAUTAN & PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Nilai produksi	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	P0, P1 dan P2	Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT)	Cakupan RT dm P3KE	DINAS SOSIAL
			Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	Cakupan RT dm P3KE	DINAS SOSIAL
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	P0, P1 dan P2	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Cakupan RT dm P3KE	DINAS SOSIAL
			Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza di luar panti sosial	Cakupan RT dm P3KE	DINAS SOSIAL
	PROGRAM PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL	P0, P1 dan P2	Pemeliharaan anak-anak terlantar	Cakupan RT dm P3KE	DINAS SOSIAL



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024-2026**

LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya IKLH	Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	IKLH	DLH
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya pengelolaan sampah	Pengelolaan sampah	Status pengelolaan sampah	DLH
KOMUNIKASI & INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK	Kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	Pengelolaan informasi & komunikasi publik	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika	DINAS KOMINFO
PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	kualitas destinasi pariwisata	Pengelolaan daya tarik wisata	jml destinasi pariwisata	DINAS PARIWISATA
			Pengelolaan destinasi pariwisata	jml destinasi pariwisata	DINAS PARIWISATA
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	kualitas wisatawan	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	jml destinasi pariwisata	DINAS PARIWISATA
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	kualitas SDM pariwisata	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jml SDM Pariwisata	DINAS PARIWISATA
KOPERASI & UKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	cakupan pembinaan umkm	Pemberdayaan usaha mikro yg dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dgn para pemangku kepentingan	jumlah umkm dan wirausaha baru	DINAS KOPERASI & UKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	proporsi pengembangan umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	jumlah umkm dan wirausaha baru	DINAS KOPERASI & UKM



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024-2026**

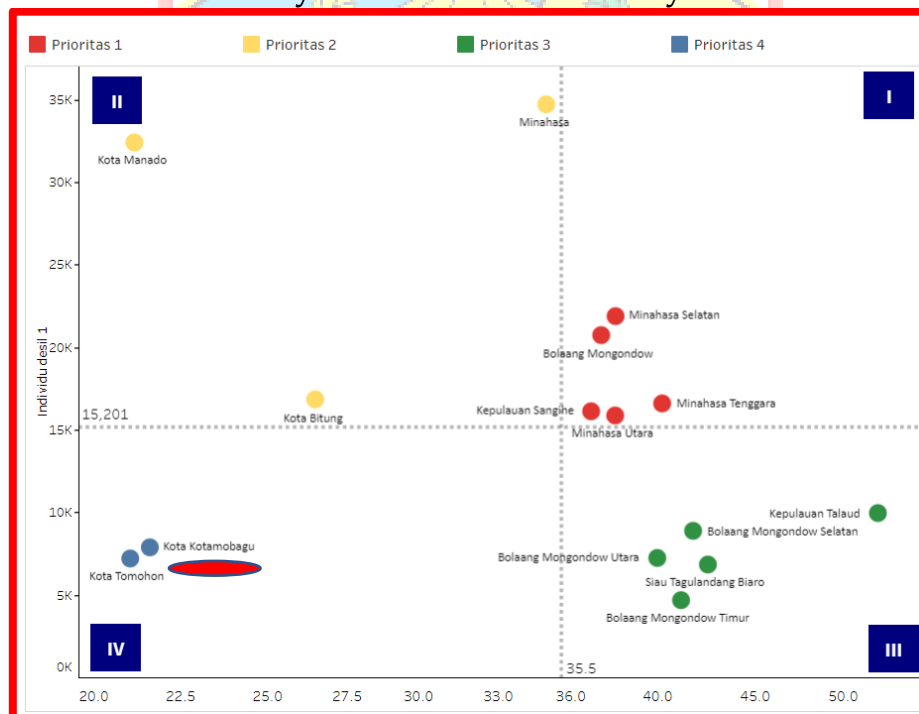
			Menjadi Usaha Kecil		
KEPEMUDAAN & OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Proporsi peningkatan produktivitas pemuda	Penyadaran, pemberdayaan & pengembangan pemuda & kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader	jumlah wirausaha muda baru	DISPORA
PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK & BARANG PENTING	IHK	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	proporsi ketersediaan barang kebutuhan pokok	DISPERINDA G
PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN & PEMBANGUNAN INDUSTRI	proporsi pengembangan IKM	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah IKM	DISPERINDA G





Penanganan kemiskinan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di tingkat provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa Kota Kotamobagu ada di prioritas 4 (empat). Artinya dibandingkan dengan kabupaten kota lain yang ada di Sulawesi Utara, kondisi kemiskinan Kota Kotamobagu tidak parah seperti lainnya. Namun disisi lain, masalah ini tetap menjadi prioritas pemerintah daerah Kota Kotamobagu.

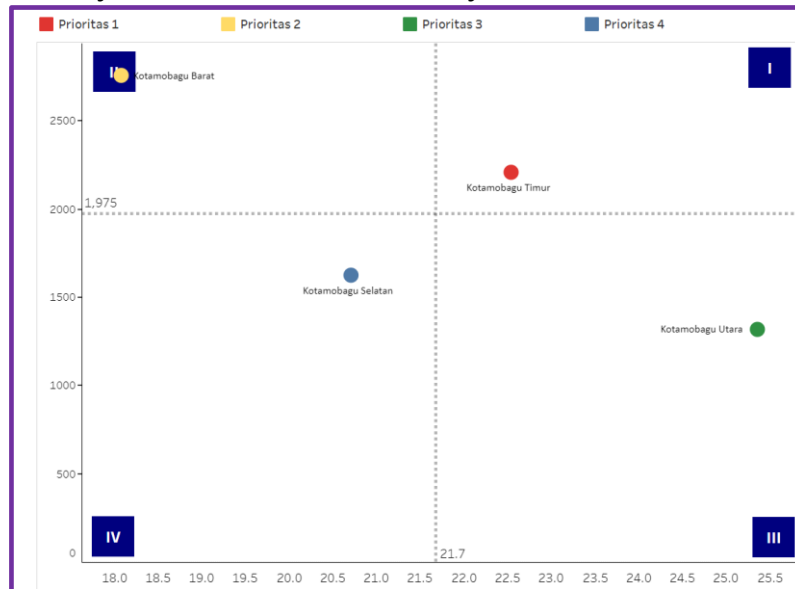
Gambar 7.1.
Prioritas Wilayah Menurut Indeks Pelayanan Dasar



Prioritas 1 (satu) wilayah penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan indeks pelayanan dasar terdapat 5 (lima) kabupaten, dan Kota Kotamobagu berada pada prioritas 4 (empat) Bersama Kota Tomohon.



Gambar 7.2.
Prioritas Wilayah Menurut Indeks Pelayanan Dasar Kota Kotamobagu



Prioritas 1 (satu) wilayah penanganan kemiskinan Kota Kotamobagu berdasarkan indeks pelayanan dasar terdapat di Kecamatan Kotamobagu Timur.

Gambar 7.3.
Prioritas Wilayah Menurut Indeks Kesulitan Geografis

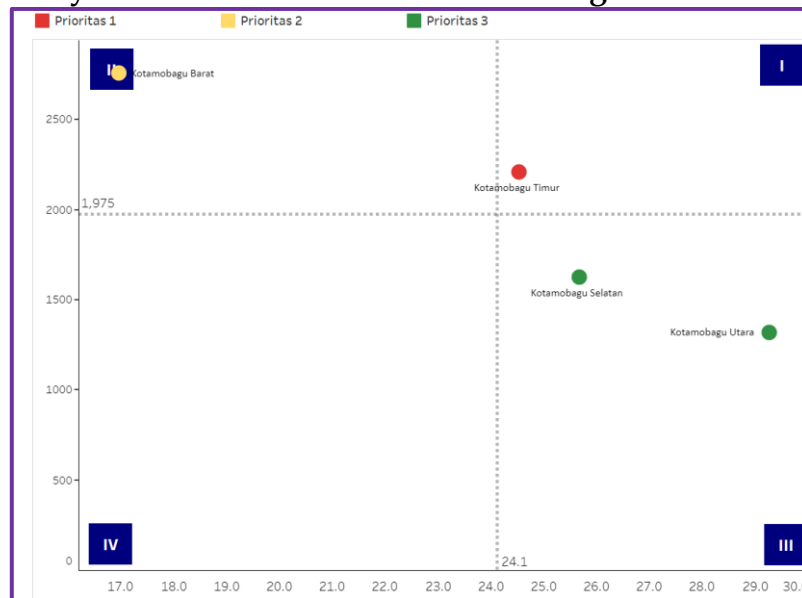


Data menunjukkan bahwa prioritas 1 (satu) wilayah dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem menurut indeks kesulitan geografis ada 4 (empat) kabupaten.



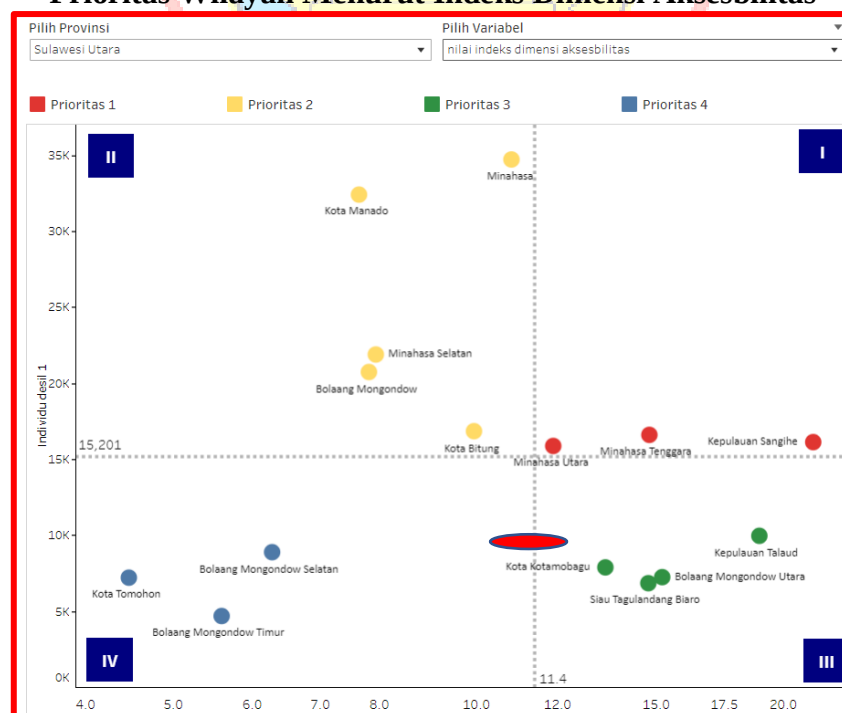
Kota Kotamobagu bersama Kota Tomohon masuk pada prioritas 4 (empat) PPKE Provinsi Sulawesi Utara.

Gambar 7.4.
Prioritas Wilayah Menurut Indeks Kesulitan Geografis Kota Kotamobagu



Prioritas 1 (satu) wilayah penanganan kemiskinan Kota Kotamobagu berdasarkan indeks pelayanan dasar terdapat di Kecamatan Kotamobagu Timur.

Gambar 7.5.
Prioritas Wilayah Menurut Indeks Dimensi Aksesibilitas





Prioritas 1 (satu) wilayah penanganan kemiskinan ekstrem Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan indeks dimensi aksesibilitas terdapat 3 (tiga) kabupaten, dan Kota Kotamobagu berada pada prioritas 3 (tiga) bersama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan SITARO.

Gambar 7.6.
Prioritas Wilayah Menurut Indeks Dimensi Aksesibilitas Kota Kotamobagu



Khusus penanganan kemiskinan Kota Kotamobagu berdasarkan indeks dimensi aksesibilitas daerah prioritas 1 (satu) adalah Kecamatan Kotamobagu Timur.

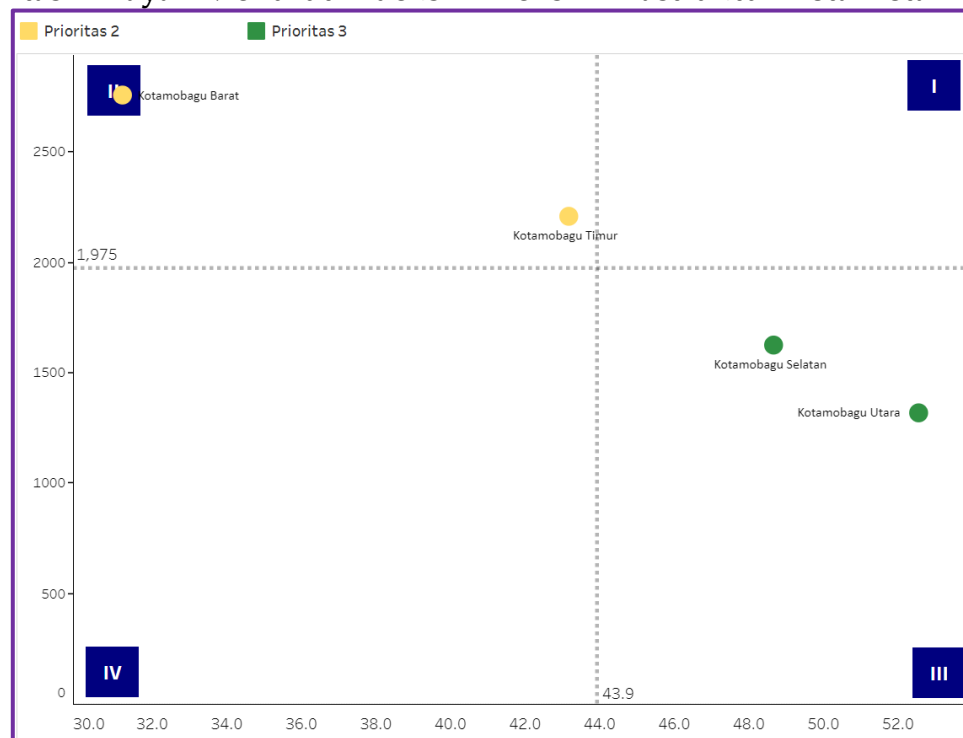
Gambar 7.7.
Prioritas Wilayah Menurut Indeks Dimensi Infrastruktur





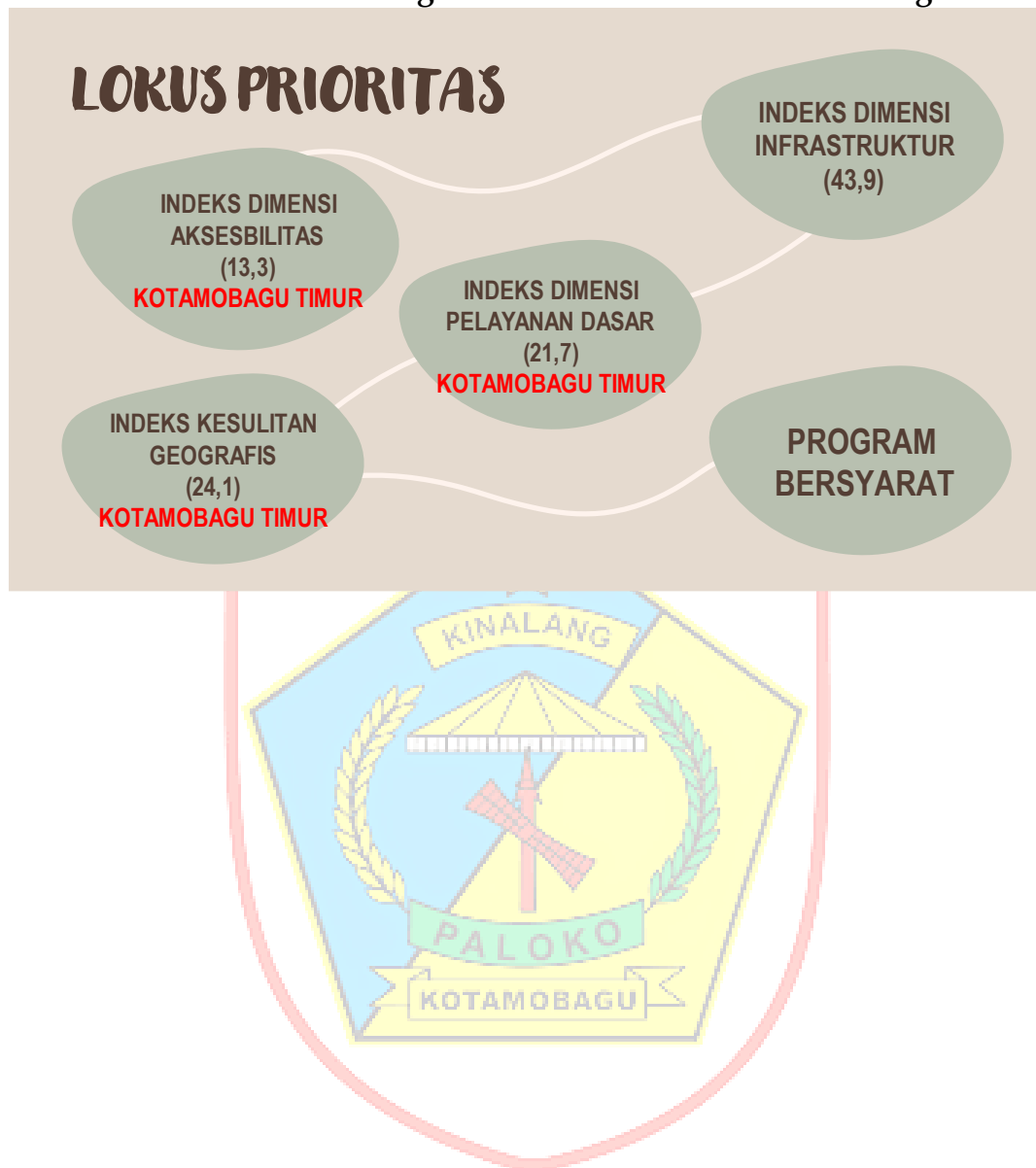
Prioritas 1 (satu) wilayah penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan indeks dimensi infrastruktur terdapat 2 (dua) kabupaten, dan Kota Kotamobagu berada pada prioritas 4 (empat) bersama Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Gambar 7.8.
Prioritas Wilayah Menurut Indeks Dimensi Infrastruktur Kota Kotamobagu



Tidak terdapat prioritas 1 (satu) wilayah penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Kota Kotamobagu berdasarkan indeks dimensi infrastruktur. Secara keseluruhan Lokus Prioritas Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem terdapat di Kecamatan Kotamobagu Timur.

Gambar 7.9.
Lokus Prioritas Penanganan Kemiskinan Kota Kotamobagu





BAB VIII

KAIDAH PELAKSANAAN, MONITORING & EVALUASI

Rencana penanggulangan kemiskinan daerah ini perlu dituntun dengan kaidah pelaksanaan yang sistematis dan koheren serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Tujuan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 Pasal 18 adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam mengambil manfaat dari proses pembangunan;
- Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Tahapan pelaksanaan rencana penanggulangan kemiskinan Kota Kotamobagu mencakup:

1. Pemerintah Kota Kotamobagu menetapkan peraturan tentang strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah dengan melampirkan dokumen analisis ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan tersebut, termasuk di dalamnya pedoman/petunjuk teknis/SOP pelaksanaannya;



2. Pemerintah Daerah menugaskan TKPKD Kota Kotamobagu untuk melaksanakan kebijakannya yang tertuang dalam dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah ini.
3. Pemerintah daerah mencanangkan pelaksanaan kebijakan ini dan mengoordinasikan serta menjamin sinergi strategi dan program prioritas ini dengan strategi dan program prioritas daerah, terutama lokus prioritas; dan
4. Setiap OPD teknis terkait melaksanakan program-program prioritas tersebut secara konsisten dan terintegrasi satu sama lain, serta memastikan pencapaian setiap target yang telah ditetapkan.

Bab ini juga mencakup kaidah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan :

1. TKPKD melakukan monitoring pelaksanaan strategi dan program strategis setiap OPD terkait yang dilaksanakan sesuai dengan periodisasi yang ditetapkan dalam Perkada penetapan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah ini.
2. TKPKD melakukan evaluasi pelaksanaan strategi dan program strategis setiap OPD terkait yang dilaksanakan sesuai dengan periodisasi yang ditetapkan dalam Perkada penetapan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah ini.
3. TKPKD menyusun laporan pelaksanaan strategi dan program strategis setiap OPD terkait yang dilaksanakan sesuai dengan periodisasi yang ditetapkan dalam Perkada penetapan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah ini.



Pemerintah Kota Kotamobagu telah melakukan validasi data miskin dan miskin ekstrem di lapangan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan validasi data. Beberapa link di bawah ini menunjukkan upaya pemerintah daerah Kota Kotamobagu :

1. [Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kotamobagu - YouTube](#)
2. [FGD PENYUSUNAN RENJA KEMISKINAN - YouTube](#)
3. [Evaluasi Data Kemiskinan Ekstrem Kotamobagu - YouTube](#)
4. [Potret Buram Kehidupan Warga Miskin di Kotamobagu - YouTube](#)
5. [Ruang Perencanaan : Pembahasan Data Miskin Ekstrem Kotamobagu - YouTube](#)
6. [Miskin Ekstrem dengan Penanggulangannya. Crosscek Data Kelurahan Matali - YouTube](#)
7. [Penanggulangan Masalah Sosial kemiskinan kotambagu - YouTube](#)
8. [Pengecekan Lapangan Data Miskin Ekstrem di Kelurahan kobo Besar - YouTube](#)



Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kotamobagu



Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kotamobagu



FGD PENYUSUNAN RENJA KEMISKINAN



Miskin Ekstrem dengan Penanggulangannya. Crosscek Data Kelurahan Matali



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024-2026



Miskin Ekstrem dengan Penanggulangannya. Crosscek Data Kelurahan Matali



Miskin Ekstrem dengan Penanggulangannya. Crosscek Data Kelurahan Matali



Miskin Ekstrem dengan Penanggulangannya. Crosscek Data Kelurahan Matali



Penanggulangan Masalah Sosial kemiskinan kotambagu



Penanggulan Masalah Sosial kemiskinan kotambagu



Penanggulangan Masalah Sosial kemiskinan kotambagu



Penanggulangan Masalah Sosial kemiskinan kotambagu



Pengecekan Lapangan Data Miskin Ekstrem di Kelurahan kobo Besar



Pengecekan Lapangan Data Miskin Ekstrim di Kelurahan kobo Besar



Pengecekan Lapangan Data Miskin Ekstrim di Kelurahan kobo Besar





BAB IX PENUTUP

- Percepatan pensasaran penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan MODAL SOSIAL dan MODAL WILAYAH.
- Meningkatkan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan baik secara internal maupun dalam hubungan dengan organisasi lainnya, perguruan tinggi, ataupun LSM.
- Penetapan data landas kemiskinan daerah melalui pemurnian data.
- Pembuatan dan pemanfaatan *Big Data* untuk penginputan/pengumpulan data. *Data by Name by* NIK dalam rangka pensasaran program kemiskinan.
- Penetapan SK Penerima program manfaat *by name by* NIK pada setiap penerima program percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Meningkatkan keterlibatan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem dari non-pemerintah melalui program CSR dari perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD



**MATRIKS 1 RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU 2024 – 2026**

Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	2023	2024	2025	Akhir RPD	SKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan pendidikan dasar	Tkt partisipasi anak usia 7-12 thn	%	99.33	99.53	99.73	99.73	
	APK SD/MI/Sederajat	%	97.32	98.32	99.32	99.32	
Pengelolaan pendidikan menengah pertama	Tkt partisipasi anak usia 13-15 thn	%	79.32	79.52	79.72	79.72	
	APK SMP/MTs/Sederajat	%	80.73	81.73	82.73	82.73	
Pengelolaan pendidikan anak usia dini	Tkt partisipasi anak usia 5-6 thn	%	48.58	48.78	48.98	48.98	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) & UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)							DINKES
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM & UKP	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Unit	6	6	6	6	
Penyediaan layanan kesehatan utk UKM & UKP rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	%	100	100	100	100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							DINKES
Pelaksanaan sehat dlm rangka promotif preventif	Persentase kelurahan siaga aktif	Des/Kel	33	33	33	33	
PROGRAM PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							PUPR
Pengelolaan & pengembangan SPAM	Persentase RT yg mendapatkan akses air minum melalui SPAM	%	77.87	88.89	100	100	
PROGRAM PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							PUPR
Pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik	Presentase Jumlah RT yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	100	100	100	100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							PUPR



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024-2026

Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	2023	2024	2025	Akhir RPD	SKPD
Penyelenggaraan Jalan	Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	68	69	70	70	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							PERKIM
Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Penyediaan RTLH bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota atau korban bencana	%	100	100	100	100	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH							PERKIM
Peningkatan kawasan permukiman kumuh dgn luas di bawah 10 Ha	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Lokasi	1	1	1	3	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							PERKIM
Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase perumahan & permukiman yg sdh dilengkapi PSU	%	14.29	14.29	14.29	14.29	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							BNPB
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penanganan pasca bencana	%	96	96	96	96	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							DINSOS
Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang terlatih & produktif	%	7,56	8,19	8,82	8.82	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							DINSOS
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Cakupan yang menerima rehabilitasi	%	30.82	33.11	35.39	35.39	
PROGRAM PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL							DINSOS
Pemeliharaan anak-anak terlantar	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	
Pengelolaan Data fakir miskin	Cakupan validasi data DTKS	%	100	100	100	100	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA							DINSOS



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024-2026

Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	2023	2024	2025	Akhir RPD	SKPD
Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							DISNAKER
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Persentase TK bersertifikat kompetensi	%	13.85	14	14.2	14.2	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							DISNAKER
Pelayanan antar kerja	Persentase TK yg ditempatkan	%	20	25	30	30	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							DP3A
Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	jml perempuan yg mengikuti kegiatan pemberdayaan	org	50	50	50	50	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							DP3A
Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	%	0,02	0,02	0,02	0,02	
Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	jml kasus terlayani	kasus	25	25	25	25	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							DP3A
Peningkatan kualitas keluarga dlm mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Persentase keluarga yg memahami KKG	%	95.39	95.40	95.42	95.42	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							DP3A
Pencegahan kekerasan terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yg tertangani	%	100	100	100	100	
Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan TPPO	%	100	100	100	100	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN & KEMANDIRIAN PANGAN							DKP



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024-2026

Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	2023	2024	2025	Akhir RPD	SKPD
Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Rasio ketersediaan infrastruktur	%	100	100	100	100	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							DKP
Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan	Persentase ketersediaan pangan	Skor PPH	91	91	91	91	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							DKP
Penanganan kerawanan pangan	Tertanganinya kerawanan pangan	%	100	100	100	100	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							DLH
Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	IKLH	%	100	100	100	100	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							DLH
Pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah	%	97,43	97,5	97,6	97,6	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							DISDUK CAPIL
Pelayanan pendaftaran penduduk	Kepemilikan KTP	Keg	25.000	25.010	25.020	25.020	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL							DISDUK CAPIL
Pelayanan pencatatan sipil	cakupan kepemilikan akte	Keg	4.095	4.105	4.115	4.115	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							DISDUK CAPIL
Pengumpulan data kependudukan & pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Laporan	6	7	6	6	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							DPP & KB
Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	85	85	85	85	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							DPP & KB



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024-2026

Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	2023	2024	2025	Akhir RPD	SKPD
Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	%	36,53	38	40	40	
PROGRAM PEMBERDAYAAN & PENINGKATAN KELUARGA SEHAJTERA (KS)							DPP & KB
Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	50	50	50	100	
PROGRAM INFORMSASI & KOMUNIKASI PUBLIK							DISKOMINFO
Pengelolaan informasi & komunikasi publik	Cakupan pengelolaan informasi & komunikasi publik	%	100	100	100	100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM							DINAS UKM & KOPERASI
Pemberdayaan usaha mikro yg dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dgn para pemangku kepentingan	Peningkatan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	%	3,6	7,72	11,59	11,59	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							DINAS UKM & KOPERASI
Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha	Usaha mikro yang dikembangkan	%	75	75	75	75	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							DPMPSTP
Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	Rata-rata lamanya pelayanan perizinan	%	90	90	90	90	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							DISPORA



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024-2026

Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	2023	2024	2025	Akhir RPD	SKPD
Penyadaran, pemberdayaan & pengembangan pemuda & kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader	Tingkat partisipasi pemuda dlm kegiatan ekonomi	%	100	100	100	100	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK PARIWISATA							DISBUDPAR
Pengelolaan destinasi pariwisata	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana	objek	1	1	1	3	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							DISBUDPAR
Pengelolaan kebudayaan yg masyarakat pelakunya	Jumlah Objek kebudayaan yang dikelola masyarakat	Objek	1	7	7	7	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							DINAS PERTANIAN
Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Persentase pertumbuhan produksi perikanan	%	90	90	100	100	
PROGRAM PENYEDIAAN & PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							DINAS PERTANIAN
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang aktif digunakan	%	90	90	100	100	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							DINAS PERTANIAN
Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Persentase keberhasilan pendampingan kelompok tani	%	95	96	97	98	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							BAPELITBANG
Koordinasi perencanaan bidang pembangunan manusia	jml dokumen kemiskinan	dokumen	1	1	1	1	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PELAYANAN PUBLIK							KECAMATAN
Koordinasi & penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	95	95	95	95	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN							KECAMATAN



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024-2026

Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	2023	2024	2025	Akhir RPD	SKPD
Koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	jml kegiatan penanggulangan kemiskinan	%	95	95	95	95	





**MATRIKS 2 RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU 2023 – 2026**

Program/ Kegiatan	2023	2024	2025	2026	SKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan pendidikan dasar	10.527.994.159	9.672.610.703	9.769.180.293	9.422.522.012	
Pengelolaan pendidikan menengah pertama	9.126.971.735	10.134.182.534	11.345.873.839	12.509.496.221	
Pengelolaan pendidikan anak usia dini	2.412.017.450	3.154.817.450	3.201.917.450	3.828.117.450	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) & UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)					DINKES
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM & UKP	10.956.953.380	13.148.344.050	15.778.012.860	18.933.615.440	
Penyediaan layanan kesehatan utk UKM & UKP rujukan	35.973.189.060	43.167.827.950	51.801.393.540	62.161.672.250	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					DINKES
Pelaksanaan sehat dlm rangka promotif preventif	140.419.152	168.502.982	202.203.570	242.644.290	
PROGRAM PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					PUPR
Pengelolaan & pengembangan SPAM	4.168.000.000	8.068.000.000	3.068.000.000	15.304.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH					PUPR
Pengelolaan & pengembangan SISTEM AIR LIMBAH	4.325.000.000	4.325.000.000	3.625.000.000	12.275.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAN JALAN					PUPR
Penyelenggaraan Jalan	23.800.000.000	34.800.000.000	21.800.000.000	80.400.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					PERKIM
Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	150.705.000	150.705.000	150.705.000	452.115.000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH					PERKIM
Peningkatan kawasan permukiman kumuh dgn luas di bawah 10 Ha	50.000.000	60.000.000	70.000.000	180.000.000	



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024-2026**

Program/ Kegiatan	2023	2024	2025	2026	SKPD
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					PERKIM
Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	8.470.321.200	8.320.321.200	8.320.321.200	25.110.693.600	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					BNPB
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	600.000.000	860.000.000	900.000.000	2.360.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					DINSOS
Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial	278.971.700	304.000.000	628.400.000	1.211.371.700	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					DINSOS
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	377.500.000	491.470.000	695.970.000	1.564.940.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL					DINSOS
Pemeliharaan anak-anak terlantar	25.000.000	25.000.000	60.000.000	110.000.000	
Pengelolaan Data fakir miskin	247.400.000	258.800.000	268.800.000	775.000.000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					DINSOS
Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	187.200.000	212.200.000	242.200.000	641.600.000	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					DISNAKER
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					DISNAKER
Pelayanan antar kerja	100.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					DP3A
Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	600.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					DP3A



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024-2026

Program/ Kegiatan	2023	2024	2025	2026	SKPD
Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	40.000.000	45.000.000	50.000.000	135.000.000	
Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	90.000.000	95.000.000	105.000.000	290.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					DP3A
Peningkatan kualitas keluarga dlm mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	1.736.365.000	1.546.104.000	1.826.895.000	5.109.364.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					DP3A
Pencegahan kekerasan terhadap anak	90.000.000	95.000.000	100.000.000	285.000.000	
Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	190.000.000	190.000.000	210.000.000	590.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN & KEMANDIRIAN PANGAN					DKP
Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	613.010.500	628.335.763	344.044.157	1.875.390.419	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					DKP
Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan	140.374.250	143.883.606	147.480.696	431.738.563	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					DKP
Penanganan kerawanan pangan	110.000.000	112.750.000	112.568.750	153.781.250	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					DLH
Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	579.797.214	619.776.935	719.776.935	1.919.351.084	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					DLH
Pengelolaan sampah	8.020.000.000	8.845.000.000	10.140.000.000	16.505.000.000	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					DISDUK CAPIL



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024-2026

Program/ Kegiatan	2023	2024	2025	2026	SKPD
Pelayanan pendaftaran penduduk	115.000.000	119.040.000	122.080.000	122.080.000	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL					DISDUK CAPIL
Pelayanan pencatatan sipil	20.240.000	23.030.000	26.000.000	26.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					DISDUK CAPIL
Pengumpulan data kependudukan & pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	90.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					DPP & KB
Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	287.433.200	312.687.600	362.687.600	962.808.400	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					DPP & KB
Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	364.415.000	364.415.000	364.415.000	1.093.245.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN & PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					DPP & KB
Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1.611.250.000	1.396.250.000	1.346.250.000	4.353.750.000	
PROGRAM INFORMSASI & KOMUNIKASI PUBLIK					DISKOMINFO
Pengelolaan informasi & komunikasi publik	7.460.470.000	7.460.470.000	7.460.470.000	22.381.410.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM					DINAS UKM & KOPERASI
Pemberdayaan usaha mikro yg dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dgn para pemangku kepentingan	534.999.500	575.000.000	610.782.320	610.782.230	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					DINAS UKM & KOPERASI
Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	641.000.000	1.225.200.000	375.000.000	375.000.0000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					DPMPSTP



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024-2026**

Program/ Kegiatan	2023	2024	2025	2026	SKPD
Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal	295.000.000	295.000.000	295.000.000	885.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					DISPORA
Penyadaran, pemberdayaan & pengembangan pemuda & kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader	1.782.604.709	1.782.604.709	1.782.604.709	5.347.811.127	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					DISBUDPAR
Pengelolaan Destinasi pariwisata	150.000.000	150.000.000	150.000.000	450.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					DISBUDPAR
Pengelolaan kebudayaan yg masyarakat pelakunya	370.000.000	370.000.000	370.000.000	1.110.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					DINAS PERTANIAN
Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	725.000.000	1.125.000.000	725.000.000	725.000.000	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					DINAS PERTANIAN
Palaksanaan penyuluhan pertanian	100.000.000	125.000.000	150.000.000	150.000.000	
PROGRAM PENYEDIAAN & PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					DINAS PERTANIAN
Pengembangan prasarana pertanian	150.000.000	250.000.000	150.000.000	150.000.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					BAPELITBANG
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang pembangunan manusia	103.764.000	350.000.000	350.000.000	803.764.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PELAYANAN PUBLIK					KECAMATAN
Koordinasi & penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1.350.400.000	1.350.400.000	1.350.400.000	1.350.400.000	KOTAMOBAGU BARAT
	612.000.000	612.600.000	643.230.000	1.231.032.300	KOTAMOBAGU SELATAN
	1.404.800.000	1.404.800.000	1.404.800.000	1.404.800.000	KOTAMOBAGU TIMUR
	53.672.000	53.673.000	53.673.000	53.673.000	KOTAMOBAGU UTARA



**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024-2026**

Program/ Kegiatan	2023	2024	2025	2026	SKPD
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN					KECAMATAN
Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan	2.450.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000	KOTAMOBAGU BARAT
	15.000.000	15.750.000	16.437.500	30.915.375	KOTAMOBAGU SELATAN
	6.090.000.000	6.090.000.000	6.090.000.000	6.090.000.000	KOTAMOBAGU TIMUR
	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	KOTAMOBAGU UTARA

